



RUPD TUBABA



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. LPPD Provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD Kabupaten/Kota disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) didasari oleh pasal 69 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewajiban Kepala Daerah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

Ringkasan LPPD yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan maksud untuk menginformasikan Kemajuan dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama Tahun 2023 kepada Masyarakat sebagai perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas melalui Media Cetak maupun Elektronik.

Tulang Bawang Barat, 25 Maret 2023
Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT

Drs. M. FIRSADA, M.Si



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1 Dasar Hukum.....	1
2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	16
3 Capaian Kinerja Makro.....	28
BAB II RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR	29
1 Urusan Kesehatan.....	29
2 Urusan Pendidikan.....	32
3 Urusan Sosial.....	33
4 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Linmas.....	36
5 Urusan Pekerjaan Umum.....	38
6 Urusan Perumahan Rakyat.....	40
BAB III HASIL EPPD DAERAH DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA	42
1. Hasil EPPD.....	42
2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya.....	43
BAB IV REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH	44
BAB V REALISASI PENERIMAAN MENURUT JENIS PENERIMAAN DAN REALISASI PENGELUARAN MENURUT JENIS PENGELUARAN DAN REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN	53
BAB VI INOVASI DAERAH	56

BAB I

PENDAHULUAN

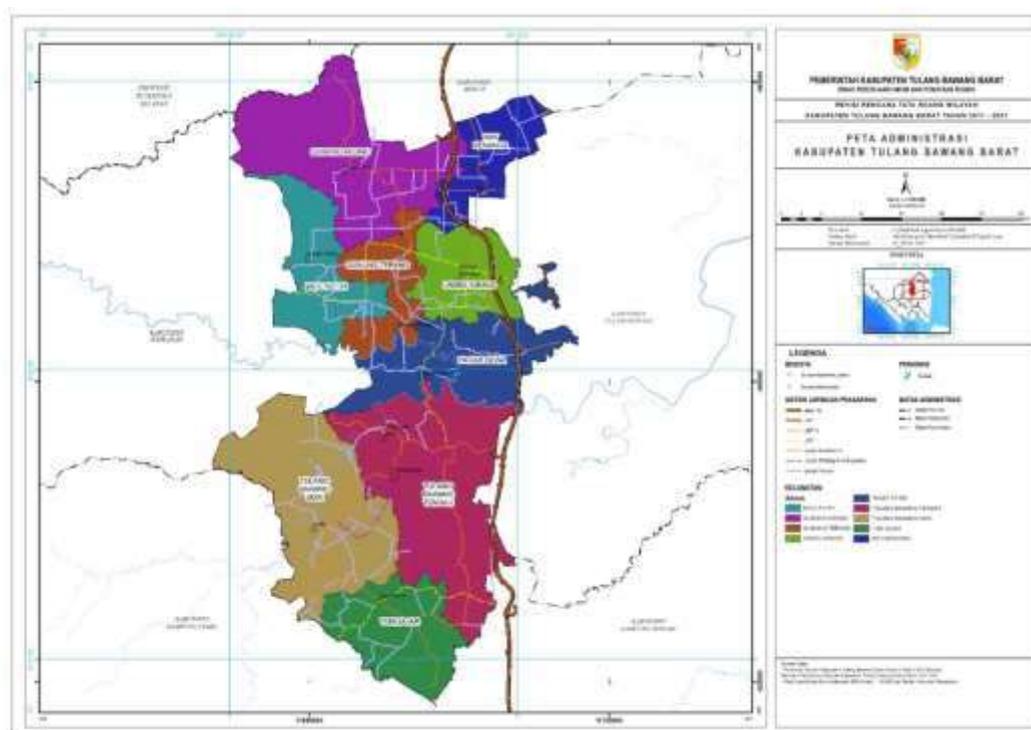
1.1 Latar Belakang

1.1.1 Dasar Hukum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dengan Kabupaten Tulang Bawang. Kabupaten ini baru diresmikan berdasarkan UU nomor 50 Tahun 2008 oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto. Pusat Pemerintahan Kabupaten terletak di Kelurahan Panaragan kecamatan Tulang Bawang Tengah.

b. Data Geografis Wilayah



Gambar Peta Administratif Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di bagian utara Provinsi Lampung. Kabupaten Tulang Bawang Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menjadikan Kabupaten Tulang Bawang Barat cukup strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi yang sedang berkembang. Secara geografis, wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak pada koordinat 104°55' – 105°10'BT dan 3°35' - 4°15' LS. Batas Kabupaten Tulang Bawang Barat berdasarkan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2008 dijelaskan sebagai berikut:

- Utara : Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.
- Selatan : Abung Surakarta dan Muara Sungkai (Lampung Utara), dan Terusan Nunyai (Lampung Tengah)
- Barat : Negara Batin, Pakuan Ratu, dan Negeri Batin (Way Kanan)
- Timur : Banjar Agung, Banjar Margo, dan Menggala (Tulang Bawang)

Secara geografis kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di ujung utara provinsi Lampung. Daerahnya terbagi atas dataran tinggi yang berupa daerah dataran dengan kemiringan 30%, merupakan daerah penghasil produksi perkebunan. Daratan yang datardengan rata-rata curah hujan yang memadai dapat menambah tingkat kesuburan tanah. Daerah datar terbentang luas pada wilayah bagian selatan merupakan daerah persawahan yang terdapat di kecamatan Tumijajar. Sedangkan wilayah yang merupakan daerah tegalan terdapat pada bagian utara yaitu dikecamatan Lambu Kibang, Gunung Agung, Gunung Terang dan Way Kenanga. Pada bagian tengah kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi oleh lahan berupa semak/belukar yaitu terdapat disebagian besar wilayah kecamatan Pagar Dewa. Potensi lahan tersebut jika dimanfaatkan secara optimal akan menjadi satu potensi yang cukup tinggi dalam menunjang pembangunan bagi Kabupaten Tulang Bawang Barat. Luas wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 125.608,49 ha.

Secara umum gambaran topografi Kabupaten Tulang Bawang Barat hanya meliputi daerah dataran hingga bergelombang dan daerah rawa. Daerah dataran sampai daerah bergelombang meliputi hampir seluruh wilayah kabupaten. Daerah ini dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan pemukiman. Jenis tanah di daerah dataran sebagian besar adalah jenis tanah podsolik. Daerah rawa berupa cekungan yang memungkinkan untuk diisi air pada musim penghujan membentuk rawa-rawa atau lebung-lebung. Daerah rawa umumnya memiliki jenis tanah alluvial. Rawa ini dapat dijumpai disekitar aliran Way Tulang Bawang, Way Kanan dan Way Kiri. Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat secara umum merupakan dataran yang cocok dimanfaatkan untuk pertanian. Luas wilayah tersebut dibagi dalam delapan kecamatan. Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Tulang Bawang Udik merupakan dua kecamatan terluas di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat dikelompokkan menjadi tiga wilayah. Pembagian ini berdasarkan kelompok wilayah yang dibatasi oleh batas alam berupa sungai. Terdapat dua sungai yang menjadi pemisah ketiga wilayah tersebut. Ketiga kelompok wilayah tersebut yaitu sisi utara yang meliputi: Kecamatan Gunung Agung, Lambu Kibang, Gunung Terang,

dan Way kenanga. Sisi Tengah meliputi wilayah Kecamatan Pagar Dewa, wilayah Tulang Bawang Tengah. Wilayah Tulang Bawang Udik. Sisi Selatan meliputi Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik, dan Kecamatan Tumijajar. Wilayah Utara dan Tengah dipisahkan oleh Way Kanan Sungai Tulang Bawang sedangkan wilayah Tengah dan Selatan dipisahkan oleh Way Kiri Sungai Tulang Bawang.

Batas alam yang memisahkan ketiga wilayah tersebut merupakan kendala pembangunan di beberapa wilayah. Hal yang paling dirasakan adalah keberadaan sungai Way Kanan yang memisahkan wilayah tengah dengan wilayah Utara. Kedua wilayah tidak dihubungkan oleh jembatan yang dihubungkan oleh jembatan yang dapat memberikan fasilitas akses transportasi darat untuk ke dua wilayah. Batas alam ini berakibat pada terputusnya akses transportasi darat antara kedua wilayah secara langsung. Akibat lain adalah semakin jauhnya jarak tempuh dari masing-masing ibu kota kecamatan yang ada di wilayah utara dengan ibu kota kecamatan yang berada di wilayah tengah dan selatan. Pada umumnya wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan daerah yang datar dengan sebagian besar wilayahnya berada pada ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut (MDPL), kecuali 2 (dua) desa di Kecamatan Tulang Bawang Tengah yang berada pada ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut, yakni Desa Chandra Kencana berada pada ketinggian 25 meter di atas permukaan laut dan Desa Panumangan yang berada pada ketinggian 23 meter di atas permukaan laut

a) Posisi Astronomis

Letak Kabupaten Tulang Bawang Barat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur terletak terletak di antara 04°10' - 04°42' Lintang Selatan dan 104°55' - 105°10' Bujur Timur.

b) Posisi Geostrategik

Posisi Kabupaten Tulang Bawang Barat secara geostrategis merupakan penghubung wilayah-wilayah kabupaten lainnya di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Way Kanan.

c) Topografi

Secara geografis Kabupaten Tulang Bawang Barat terletak di ujung Utara Provinsi Lampung. Daerahnya terbagi atas dataran tinggi yang berupa daerah dataran dengan kemiringan 30%, merupakan daerah penghasil produksi perkebunan. Daratan yang datar dengan rata-rata curah hujan yang memadai dapat menambah tingkat kesuburan tanah. Daerah datar terbentang luas pada wilayah bagian selatan merupakan daerah persawahan yang terdapat di Kecamatan Tumijajar.

d) Geologi

Keadaan geologi penyusun batuan Kabupaten Tulang Bawang Barat umumnya tersusun atas formasi Muara Enim yang terdiri dari perselingan batu lempung pasiran dan batu lanau tufan dengan sisipan batu pasir tufan dan batu lempung hitam. Selain itu terdapat pula formasi pasir kwarsa yang membentang disepanjang sisi timur dengan bentukan pasir kasar kerikil sampai sedang dan penyusun dominan mineral kwarsa. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Aluvial, Regosol, Podsolik Coklat, Latosol, dan Podsolik Merah Kuning. Dalam sistem klasifikasi Soil Taxonomy, jenis tersebut setara dengan ordo tanah Entisols, Alfisols, Inceptisols, Oxisols, dan Ultisols. Karakteristik alluvial memiliki kandungan kerakal, kerikil, lempung dan setempat pecahan cangkang fosil. Daerah dengan karakteristik alluvial umumnya terdapat pada daerah endapan sungai, dengan jenis tanah tropquents, fluvaquents dan tropofluents. Endapan aluvial terdiri atas kerakal, kerikil, batu pasir halus kasar endapan ini umumnya berasal dari endapan Way Tulang Bawang.

e) Hidrologi

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki 5 sungai dan 3 Daerah Aliran Sungai (DAS). Secara umum, kondisi sistem hidrologi disuatu daerah dapat ditinjau dari kajian DAS. Daerah aliran sungai merupakan suatu bentang alam yang dibatasi oleh pemisah alami berupa topografi perbukitan/pegunungan dan berfungsi mengumpulkan, menyimpan dan mengalirkan air, sedimen dan unsur hara ke sungai utama yang akhirnya bermuara pada satu outlet tunggal. Pola aliran drainase menunjukkan arah aliran yang masing-masing menuju ke sungai-sungai utama yang melintasi dan di sekitar wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang selanjutnya dapat disebut sebagai sistem hidrologi/drainase wilayah. Kondisi sumberdaya air di Tulang Bawang Barat dapat digambarkan dari melalui air permukaan dan air tanah. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah daerah dataran sampai dengan dataran bergelombang. Sebagian wilayah Tulang Bawang Barat ini merupakan daerah aliran sungai yang merupakan anak sungai Tulang Bawang. Pola aliran sungai di Kabupaten Tulang Bawang Barat antara lain:

(1) Pola aliran dendritik, yaitu pola aliran berbentuk seperti pohon.

(2) Pola aliran trellis, yaitu pola aliran pada beberapa sungai yang mendapat tambahan air dari anak sungainya, dimana arah alirannya tegak lurus pada sungai tersebut.

Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki 15 sungai dan 3 Daerah Aliran Sungai (DAS). Sungai utama yang melalui Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Way Kanan, Way Kiri dan Way Tulang Bawang. Informasi

tentang sungai, panjang sungai dan daerah alir sungai di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat tersaji pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Nama-nama Sungai, Panjang sungai, dan Daerah Alir
di Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Nama Sungai	Panjang (Km)	Daerah Alir (Km2)
1.	Way Kiri	80,630	4,0315
2.	Way Kanan	31,163	1,5582
3.	Way Kemampung	35,750	1,0725
4.	Way Sumber Rejo	24,750	0,7420
5.	Way Campang Raya	23,780	0,7160
6.	Way Tulung Sawo	27,870	0,5500
7.	Way Papan	27,500	0,4400
8.	Way Sido	22,000	0,4400
9.	Way Purus	22,000	0,4399
10.	Sungai Muaradua	14,663	0,4125
11.	Way Wonokerto	13,750	0,3850
12.	Way Gemol	19,250	0,3849
13.	Way Campang	25,663	0,3849
14.	Way Tulang Kibang	17,413	0,3483
15.	Way Bakung Jelai	22,000	0,3300
Jumlah		408,182	11,7957

Sumber : RTRW Kab. Tulang Bawang Barat Tahun 2011- 2031

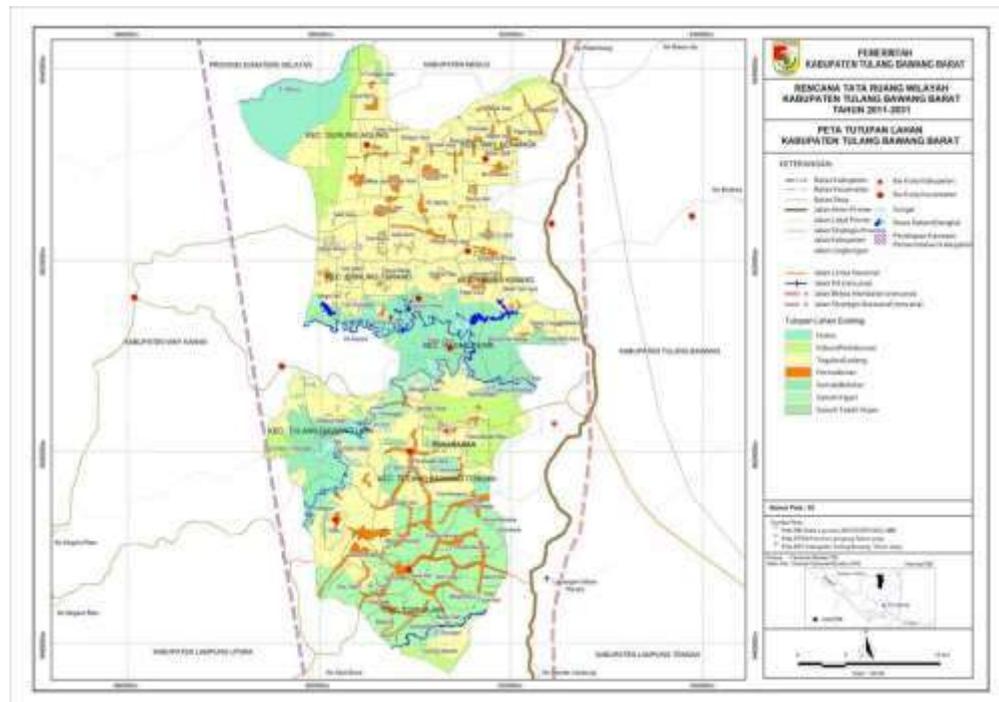
Berdasarkan pengolahan data dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung (2014), diketahui bahwa debit maksimum Way Kiri akan terjadi pada bulan Februari-April, dengan debit sebesar 160 m³/detik, dan debit minimum pada bulan Oktober yaitu sebesar 30 m³/detik.

f) **Klimatologi**

Berdasarkan klasifikasi iklim Smith dan Ferguson, wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat masuk ke dalam tipe iklim B yang dicirikan dengan jumlah bulan basah selama 9 bulan pada bulan September - Mei. Berdasarkan data Kabupaten Tulang Bawang Barat Dalam Angka Tahun 2022, curah hujan di Kabupaten Tulang Bawang Barat pada Bulan Januari 2022 hingga Desember 2022 berjumlah di antara 14,3 mm (Juli) hingga 351,9 mm (Desember) dengan rata-rata suhu per bulan berada pada 27,8 oC – 30,5oC dan rata-rata kelembaban berkisar pada 75,7% – 83,9%.

g) Penggunaan Lahan

Keadaan kondisi tutupan lahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri dari 7 (tujuh) jenis tutupan lahan, yaitu: permukiman, tegalan/ladang, sawah tadah hujan, semak/belukar, kebun/perkebunan, sawah irigasi dan hutan. Tutupan lahan terbesar adalah tegalan/ladang seluas 55.670 Ha atau 46,35 % dari luas Kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan jenis tutupan lahan terkecil adalah sawah tadah hujan yang luasnya hanya 349 Ha atau 0,29 % dari luas tutupan lahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Peta Tutupan Lahan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada gambar 2.2.



Gambar 2.2 Peta Tutupan Lahan Kab. Tulang Bawang Barat
Sumber: RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031

Deskripsi wilayah tanah kering dan luas area yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat terbagi atas area permukiman 6.455 ha, tegalan/ladang 55.670 ha sawah tadah hujan 349 ha, semak/belukar 18.781 ha, kebun/perkebunan 13.221 ha, sawah irigrasi 19.797 ha, hutan 5.827 ha. Daerah tegalan terdapat pada bagian Utara yaitu di Kecamatan Lambu Kibang, Gunung Agung, Gunung Terang dan Way Kenanga. Pada bagian tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat didominasi oleh lahan berupa semak/belukar yaitu terdapat di sebagian besar wilayah Kecamatan Pagar Dewa. Selain itu, Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) terletak di Kecamatan Gunung Agung dan Gunung Terang dengan luas 11,470.92 Ha.

Rencana pola ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011-2031 meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung direncanakan seluas 6.294,08 Ha atau

5,24 % dan kawasan budidaya direncanakan seluas 113.805,92 Ha atau 94,76 % dari total luas kabupaten. Kawasan lindung dan kawasan budidaya di Kabupaten Tulang Bawang Barat tersaji pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Kawasan Lindung Kabupaten Tulang Bawang Barat

No.	Jenis Kawasan Lindung	Keterangan
1.	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan	Kawasan sekitar rawa yang terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Kecamatan Pagar Dewa
2.	Kawasan perlindungan setempat	Sempadan sungai dikembangkan pada seluruh aliran sungai yang ada dikabupaten, baik yang mengalir di kawasan perkotaan maupun diluar kawasan perkotaan
3.	Kawasan Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Kawasan Benteng Karang Talang dan Benteng Sabuk yang terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Udik, b. Kawasan Makam Minak Indah/ Tuan Rio Sanak di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, c. Kawasan Makam Tuan Rio Mangku Bumi (Raja Tulang Bawang), Makan Tuan Rio Cikai Dilangek (Hulu Bawang Kerajaan Tulang Bawang), Makam Prajurit Hidayatullah (putra Mahkota), Makam Tubagus Buang, dan Makam Tubagus Minak Saleh
4.	Kawasan Rawan Bencana	Kawasan rawan banjir yang terdapat di sekitar bantaran sungai Tulang Bawang yang melewati Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Lambu Kibang, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Gunung Agung.

Sumber: RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat 2011-2031

Tabel 2.4 Kawasan Budidaya di Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Jenis Kawasan Budidaya	Lokasi
1.	Hutan Produksi	Kecamatan Gunung Agung dan Gunung Terang
2.	Hutan Rakyat	Gunung Agung dan Kecamatan Gunung Terang
3.	Pertanian	
	Pertanian Tanaman Pangan	Beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat
	Sawah irigasi	Beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat
	Sawah bukan irigasi	Beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat
	Pertanian Holtikultura	Seluruh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat
	Perkebunan	Tulang Bawang Tengah, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kecamatan Way Kenanga, dan Kecamatan Tumijajar
	Peternakan	Seluruh Kecamatan Kabupaten Tulang Bawang Barat
4	Perikanan	
	Perikanan Budidaya	Kecamatan Pagar Dewa, Gunung Terang, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik
	Pengolahan Ikan	Kecamatan Pagar Dewa, Gunung Terang, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik
	Minapolitan	Kecamatan Pagar Dewa, Kecamatan Gunung Terang, Kecamatan Tulang Bawang Tengah dan Kecamatan Tulang Bawang Udik
5	Pertambangan	Sepanjang Sungai Way Tulang Bawang, Way Kanan dan Way Kiri yang tersebar di Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Tulang Bawang Udik dan Pagar Dewa
6	Perindustrian	
	Kawasan industri kecil dan rumah tangga	Kecamatan Pagar Dewa dan Tumijajar
	Kawasan Industri pengolahan hasil tanaman perkebunan	Kawasan Perkebunan
7	Pariwisata	
	Pariwisata Alam	Kecamatan Pagar Dewa
	Pariwisata Buatan	Kecamatan Tumijajar dan Tulang Bawang Tengah
	Pariwisata Budaya	Kecamatan Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Tengah, dan Pagar Dewa
8	Pemukiman	
	Pemukiman Perkotaan	Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah dan Lambu Kibang
	Pemukiman Pedesaan	Kecamatan Tumijajar, Tulang Bawang Tengah, Way Kenanga, Gunung Terang, Gunung Agung, Pagar Dewa dan Tulang Bawang Udik
9	Kawasan peruntukan lainnya	

Sumber: RTRW Kabupaten Tulang Bawang Barat 2011-2031

c. Jumlah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat

Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat menurut data tahun 2023 sebanyak 307.558 jiwa tersebar di 9 kecamatan dan 103 Tiyuh/desa dan Kelurahan , dan jika dibandingkan dengan luas Kabupaten Tulang Bawang Barat seluas 1.201 km² maka didapat kepadatan penduduk Tulang Bawang Barat adalah 222 jiwa/km².

Berdasarkan struktur umur penduduk tahun 2023, komposisi penduduk usia 14 tahun ke bawah mencapai 25,48% dari total Penduduk, penduduk usia 15-59 tahun sebesar 64,004% dari Total Penduduk, dan usia diatas 60 tahun sebesar 10,51%. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1.2 dan gambaran struktur umur penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Gambar 2.5.

Tabel 2.5
Jumlah penduduk menurut kelompok umur
dan jenis Kelamin tahun 2023

No	Kelompok umur	Jumlah
1	Usia 0-4 thn	20.604
2	Usia 5-9 thn	26.767
3	Usia 10-14 thn	28.600
4	Usia 15-19 thn	21.521
5	Usia 20-24 thn	23.217
6	Usia 25-29 thn	23.427
7	Usia 30-34 thn	24.762
8	Usia 35-39 thn	24.925
9	Usia 40-44 thn	23.947
10	Usia 45-49 thn	20.426
11	Usia 50-54 thn	18.702
12	Usia 55-59 thn	15.309
13	Usia 60-64 thn	12.737
14	Usia 65-69 thn	8.445
15	Usia 70-74 thn	5.971
16	Usia 75 thn ke atas	8.198
Total		307.558

Perkembangan jumlah penduduk selama periode 2016-2023 setiap tahun secara umum mengalami perubahan dan penyebarannya belum merata. Pada tahun 2016 jumlah penduduk sebanyak 266.973 jiwa sedangkan pada

tahun 2023 jumlah penduduk menjadi 307.558 jiwa. Angka ini meningkat sebesar 12,49% dibandingkan tahun sebelumnya dengan komposisi laki-laki 151.569 jiwa dan perempuan 145.096 jiwa. Secara rinci perkembangan penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6
Perkembangan Jumlah Penduduk Menurut
Jenis Kelamin Tahun 2016 s.d 2023
Kabupaten Tulang Bawang Barat

No	Tahun	Jumlah Jiwa		Jumlah Penduduk
		Laki-laki	Perempuan	
1	2016	136.992	130.051	266.973
2	2017	138.667	130.482	269.149
3	2018	141.015	132.483	272.498
4	2019	146.489	138.914	285.403
5	2020	146.506	139.695	286.201
6	2021	151 569	145 096	296 665
7	2022	153.331	146.997	302.569
8	2023	157.053	150.505	307.558

Ditinjau dari perkembangan laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Laju pertumbuhan pada tahun 2016-2023 sebesar 12,49%

Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebar di sembilan kecamatan, pada tahun 2023, Penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Pagar Dewa (2,58%) dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 69 jiwa/km², sementara penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Tulang Bawang Tengah dengan persentase penduduk sebesar 31,17 dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 303 jiwa/km².

Jumlah penduduk dan kepadatan per kecamatan sebagaimana Tabel 2.5 dan persentase jumlah penduduk per kecamatan terhadap jumlah populasi total Kabupaten tergambar pada Gambar 2.7

JUMLAH, PENYEBARAN, DAN KEPADATAN PENDUDUK
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
SEMESTER II (JULII - DESEMBER) 2023

NO	TIYUH/KELURAHAN	JUMLAH KK	PENDUDUK (Jiwa)			LUAS WILAYAH (Km ²)	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/km ²)	KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)			Jumlah DP 4
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah			Jumlah Wajib KTP	Yang Telah Rekam TP	Yang Belum Rekam KTP	
1	MULYO ASRI	2.282	3.465	3.356	6.821	49,57	138	5.050	4.935	115	4.785
2	PANARAGAN JAYA	2.306	3.715	3.605	7.320	31,27	234	5.319	5.175	144	5.150
3	PANARAGAN	1.969	3.393	3.206	6.599	41,27	160	4.617	4.505	112	4.573
4	BANDAR DEWA	473	726	738	1.464	56,58	26	1.048	1.023	25	1.028
5	MENGGALA MAS	430	710	697	1.407	10,00	141	969	950	19	976
6	PENUMANGAN	1.457	2.561	2.449	5.010	5,52	908	3.354	3.262	92	3.437
7	PENUMANGAN BARU	1.434	2.167	2.089	4.256	17,70	240	3.140	3.058	82	3.065
8	TIRTA KENCANA	1.914	2.813	2.683	5.496	16,74	328	4.158	4.028	130	4.093
9	PULUNG KENCANA	3.089	4.689	4.580	9.269	20,00	463	6.818	6.653	165	6.610
10	MULYA KENCANA	1.938	3.001	2.883	5.884	13,62	432	4.370	4.274	96	4.240
11	CANDRA KENCANA	1.662	2.526	2.267	4.793	9,31	515	3.530	3.458	72	3.448
12	TUNAS ASRI	1.846	2.767	2.662	5.429	10,00	543	3.983	3.871	112	3.827
13	WONO KERTO	727	1.135	1.047	2.182	11,58	188	1.632	1.595	37	1.602
14	PANARAGAN JAYA UTAMA	766	1.208	1.101	2.309	6,87	336	1.713	1.670	43	1.680
15	PANARAGAN JAYA INDAH	549	827	829	1.656	7,61	218	1.200	1.169	31	1.164
16	MULYA JAYA	1.543	2.296	2.206	4.502	10,00	450	3.361	3.289	72	3.273
17	TIRTA MAKMUR	1.404	2.202	2.132	4.334	10,27	422	3.169	3.082	87	3.006
18	CANDRA MUKTI	972	1.494	1.425	2.919	10,07	290	2.141	2.098	43	2.087
19	CANDRA JAYA	1.122	1.722	1.646	3.368	10,69	315	2.421	2.375	46	2.346
20	MARGA ASRI	1.004	1.524	1.417	2.941			2.238	2.181	57	2.226
21	MEKAR ASRI	1.428	2.243	2.081	4.324			3.247	3.172	75	3.179
TULANG BAWANG TENGAH		30315	47184	45099	92283	348,67	265	67478	65823	1655	65795

22	DAYA MURNI	3.005	4.540	4.588	9.128	12,50	730	6.754	6.584	170	6.531
23	DAYA SAKTI	1.717	2.518	2.426	4.944	10,36	477	3.763	3.689	74	3.668
24	MARGO MULYO	1.761	2.618	2.445	5.063	10,00	506	3.801	3.713	88	3.707
25	MAKARTI	1.866	2.669	2.666	5.335	10,15	526	4.074	3.976	98	3.940
26	GUNUNG MENANTI	1.057	1.584	1.508	3.092	10,06	307	2.253	2.186	67	2.195
27	DAYA ASRI	1.522	2.263	2.262	4.525	10,19	444	3.424	3.350	74	3.327
28	MURNI JAYA	1.559	2.316	2.168	4.484	86,37	52	3.371	3.280	91	3.284
29	SUMBER REJO	1.263	1.828	1.761	3.589	7,50	479	2.718	2.658	60	2.628
30	MARGO DADI	2.002	3.002	2.905	5.907	12,30	480	4.396	4.277	119	4.233
31	GUNUNG TIMBUL	784	1.111	1.099	2.210	9,72	227	1.691	1.660	31	1.665
TUMIJAJAR		16536	24449	23828	48277	179,15	269	36245	35373	872	35178
32	KARTA	1.283	1.924	1.903	3.827	21,99	174	2.805	2.755	50	2.753
33	KARTA SARI	765	1.113	1.099	2.212	8,23	269	1.652	1.623	29	1.585
34	KARTA RAHARJA	1.387	2.055	2.011	4.066	8,52	477	3.050	2.979	71	3.030
35	GUNUNG KATUN TANJUNGAN	512	803	775	1.578	4,24	372	1.159	1.142	17	1.158
36	GUNUNG KATUN MALAI	331	501	498	999	8,06	124	707	693	14	690
37	GEDUNG RATU	837	1.414	1.294	2.708	11,10	244	1.905	1.863	42	1.850
38	KAGUNGAN RATU	1.716	2.488	2.420	4.908	13,24	371	3.666	3.558	108	3.541
39	MARGA KENCANA	1.165	1.674	1.648	3.322	9,00	369	2.556	2.503	53	2.426
40	WAY SIDO	1.332	1.908	1.804	3.712	8,50	437	2.856	2.788	68	2.782
41	KAGUNGAN RATU AGUNG	776	1.149	1.022	2.171			1.654	1.616	38	1.618
42	GADING KENCANA	1.007	1.515	1.501	3.016			2.319	2.275	44	2.310
43	KARTA RAYA	750	1.117	1.086	2.203			1.667	1.650	17	1.678
44	KARTA TANJUNG SELAMAT	248	412	359	771			566	554	12	547
TULANG BAWANG UDIK		12109	18073	17420	35493	92,88	382	26562	25999	563	25968
45	TOTO MULYO	1.108	1.615	1.540	3.155	9,58	329	2.288	2.224	64	2.179

46	SETIA BUMI	1.249	1.818	1.781	3.599	8,74	412	2.644	2.561	83	2.559
47	GUNUNG TERANG	1.168	1.940	1.876	3.816	12,91	296	2.608	2.521	87	2.532
48	GUNUNG AGUNG	804	1.222	1.095	2.317	13,63	170	1.702	1.662	40	2.089
49	KAGUNGAN JAYA	248	379	347	726	5,46	133	525	510	15	519
50	TERANG MULYA	210	355	350	705	3,50	201	475	453	22	466
51	TERANG BUMI AGUNG	562	827	761	1.588	2,58	616	1.170	1.143	27	1.126
52	SETIA AGUNG	555	836	775	1.611	5,65	285	1.160	1.125	35	1.114
53	MULYO JADI	768	1.205	1.111	2.316	3,98	582	1.642	1.601	41	1.578
54	TERANG MAKMUR	313	452	437	889	4,50	198	647	627	20	645
GUNUNG TERANG		6985	10649	10073	20722	70,53	294	14861	14427	434	14335
55	TUNAS JAYA	1.663	2.495	2.365	4.860	13,41	362	3.515	3.420	95	3.448
56	MEKAR JAYA	1.527	2.325	2.171	4.496	15,09	298	3.251	3.156	95	3.199
57	MARGA JAYA	1.244	1.840	1.737	3.577	12,00	298	2.621	2.530	91	2.509
58	JAYA MURNI	1.128	1.746	1.526	3.272	11,42	287	2.410	2.341	69	2.373
59	SUKA JAYA	1.814	2.628	2.497	5.125	13,47	380	3.827	3.716	111	3.715
60	MULYA JAYA	1.244	1.795	1.701	3.496	8,96	390	2.597	2.521	76	2.552
61	BANGUN JAYA	817	1.235	1.186	2.421	10,77	225	1.768	1.700	68	1.712
62	SUMBER JAYA	511	746	700	1.446	10,05	144	1.072	1.039	33	1.039
63	WONO REJO	502	720	678	1.398	7,25	193	1.055	1.026	29	1.054
64	TRI TUNGGAL JAYA	402	650	640	1.290	6,50	198	951	921	30	924
65	MULYA SARI	592	848	829	1.677	8,00	210	1.253	1.224	29	1.209
66	DWIKORA JAYA	544	818	779	1.597	5,38	297	1.174	1.150	24	1.138
67	SUMBER REJEKI	296	418	412	830	4,01	207	617	606	11	594
GUNUNG AGUNG		12284	18264	17221	35485	126,31	281	26111	25350	761	25466
68	AGUNG JAYA	877	1.167	1.092	2.259	14,24	159	1.663	1.624	39	1.677
69	MERCU BUANA	864	1.255	1.226	2.481	12,39	200	1.831	1.770	61	1.729
70	BALAM JAYA	1.048	1.463	1.424	2.887	30,65	94	2.150	2.088	62	2.130
71	PAGAR BUANA	721	989	953	1.942	10,93	178	1.466	1.417	49	1.429
72	INDRALOKA I	1.016	1.479	1.377	2.856	14,38	199	2.137	2.080	57	2.092

73	INDRALOKA II	1.092	1.575	1.508	3.083	27,60	112	2.226	2.171	55	2.183
74	BALAM ASRI	882	1.254	1.205	2.459	27,00	91	1.853	1.805	48	1.760
75	INDRALOKA JAYA	1.165	1.822	1.795	3.617	27,00	134	2.586	2.484	102	2.506
76	INDRALOKA MUKTI	745	1.130	1.065	2.195	23,00	95	1.608	1.560	48	1.587
77	SIDO AGUNG	463	666	647	1.313			963	935	28	897
WAY KENANGA		8873	12800	12292	25092	187,19	134	18483	17934	549	17990
78	KIBANG BUDI JAYA	2.188	3.246	3.271	6.517	12,19	535	4.778	4.613	165	4.645
79	LESUNG BHAKTI JAYA	695	993	982	1.975	8,30	238	1.451	1.418	33	1.413
80	MEKAR SARI JAYA	562	859	823	1.682	8,56	196	1.206	1.166	40	1.180
81	PAGAR JAYA	674	933	920	1.853	6,50	285	1.371	1.341	30	1.321
82	GUNUNG SARI	613	943	874	1.817	7,00	260	1.289	1.250	39	1.289
83	SUMBER REJO	637	934	877	1.811	6,70	270	1.289	1.240	49	1.270
84	KIBANG YEKTI JAYA	1.056	1.480	1.403	2.883	8,11	355	2.142	2.092	50	2.083
85	KIBANG TRI JAYA	983	1.437	1.333	2.770	8,00	346	2.046	1.982	64	1.985
86	GILANG TUNGGAL MAKARTA	495	796	738	1.534	7,47	205	1.126	1.089	37	1.101
87	KIBANG MULYA JAYA	638	938	909	1.847	5,63	328	1.339	1.295	44	1.330
LAMBU KIBANG		8541	12559	12130	24689	78,46	315	18037	17486	551	17617
88	PAGAR DEWA	512	799	767	1.566	10,07	156	1.115	1.083	32	1.105
89	PAGAR DEWA SUKA MULYA	279	405	404	809	40,00	20	561	542	19	562
90	CAHYOU RANDU	663	1.061	990	2.051	5,00	410	1.410	1.362	48	1.403
91	BUJUNG DEWA	450	707	666	1.373	6,08	226	976	944	32	946
92	BUJUNG SARI MARGA	274	381	371	752	9,05	83	547	532	15	542
93	MARGA JAYA INDAH	365	539	501	1.040	6,00	173	772	752	20	762
PAGAR DEWA		2543	3892	3699	7591	76,20	100	5381	5215	166	5320

94	PANCA MARGA	661	1.041	994	2.035	3,25	626	1.461	1.414	47	1.440
95	SIDO MAKMUR	448	691	680	1.371	3,25	422	973	940	33	932
96	SAKTI JAYA	806	1.209	1.088	2.297	5,17	444	1.690	1.639	51	1.635
97	MARGO MULYA	753	1.089	1.058	2.147	4,29	500	1.591	1.535	56	1.556
98	MARGO DADI	501	770	738	1.508	4,29	352	1.080	1.031	49	1.026
99	MARGA SARI	612	862	824	1.686	4,01	420	1.253	1.203	50	1.191
100	MULYO SARI	435	683	649	1.332	4,01	332	963	932	31	954
101	TOTO KATON	828	1.215	1.168	2.383	3,95	603	1.709	1.642	67	1.618
102	TOTO MAKMUR	553	824	794	1.618	3,86	419	1.190	1.141	49	1.149
103	TOTO WONODADI	528	799	750	1.549	5,53	280	1.143	1.096	47	1.121
BATU PUTIH		6125	9183	8743	17926	41,61	431	13053	12573	480	12622
JUMLAH		104311	157053	150505	307558	1.201,00	2.470	226211	220180	6031	220291

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang mengamanatkan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara serentak nasional pada tahun 2024, sehingga daerah otonom yang habis masa jabatan kepala daerah pada tahun 2022 atau 2023 tidak memiliki kepala daerah. Hal ini menyebabkan daerah tersebut tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah sebagaimana mestinya dikarenakan periode RPJMD berakhir.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, agar kepala daerah yang masa jabatannya berakhir tahun 2022 untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026. RPD Tahun 2023 – 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah yang akan digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023 – 2026 disajikan pada Tabel 2.12.

Tabel 2.12.

**TUJUAN DAN SASARAN BERDASARKAN RPD 2022-2026 MERUPAKAN
PENJABARAN RPJPD KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2005-2025**

Visi : Tulang Bawang Barat Kabupaten Agraris yang Makmur dan Sejahtera”

Tujuan	Sasaran
Misi I. Mengembangkan Sumberdaya Manusia Yang Berdaya Saing Tinggi	
Meningkatkan Kualitas Pendidikan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulang Bawang Barat	1. Pembangunan pendidikan diarahkan pada pemantapan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan untuk meningkatkan harkat martabat dan kualitas manusia sehingga mampu bersaing dalam era global.
	2. Prasarana dan sarana pendidikan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat
	3. Program Nasional wajib belajar 12 tahun
	4. Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan luar sekolah
	5. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga penunjang lainnya
Kualitas tenaga kerja kompetitif dalam persaingan nasional dan global	1. Keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi yang berdaya saing tinggi.
	2. Kurikulum penunjang berbasis kompetensi lokal
	3. Pembangunan pendidikan diselenggarakan dengan meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan serta pelatihan yang mampu merespon globalisasi terhadap kebutuhan pembangunan nasional melalui pengembangan kurikulum pendidikan dan jalur pendidikan dengan memperhatikan kearifan lokal dan potensi tulang bawang barat.
Meningkatnya wirausahawirausaha baru yang bisa mempunyai capabilitas memadai untuk berkembang	1. Pelatihan dan Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari tingginya jiwa kewirausahaan, tingginya motivasi, inovasi kreativitas dan tingginya kerja serta profesionalisme di bidang penguasaan teknologi, manajemen dan wawasan bisnis, di mana hal ini sangat mempengaruhi daya saing produksi untuk menciptakan peluang usaha.

Meningkatnya kualitas kesehatan	1. Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan, dan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan pemberdayaan kesehatan masyarakat, serta manajemen kesehatan
	2. Pemerataan sarana kesehatan
	3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan
	4. Peningkatan Peran serta masyarakat dan swasta dalam penyediaan prasarana kesehatan.
	5. Pengembangan kepedulian masyarakat dalam kesehatan dan sanitasi lingkungan.
Laju pertumbuhan penduduk menurun menuju keseimbangan.	1. Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk yang didukung dengan pengembangan dan penataan system administrasi kependudukan dan catatan sipil secara terpadu.
	2. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana
Kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang (ekonomi, social, politik, budaya) semakin tinggi	1. Peningkatan pembangunan keluarga peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda diberbagai bidang pembangunan terutama di bidang ekonomi, social budaya, iptek dan politik
	2. Peningkatan kualitas kepemudaan dan prestasi olah raga dalam konteks lokal, regional dan nasional
	3. Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja dengan cara penguasaan dan penciptaan IPTEK.

Tujuan	Sasaran
Misi II. Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi, Merata dan Berkelanjutan	
Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Perekonomian Daerah	1. Terwujudnya perkembangan industri dan UKM berbasis potensi local
	2. Terciptanya produk pertanian yang berdaya saing
	3. Diversifikasi pertanian

	4. Terwujudnya ketahanan pangan
	5. Meningkatnya akses informasi dan kemudahan perizinan investasi
	6. Terwujudnya lembaga ekonomi produktif yang mandiri dan maju
	7. Terkelolanya sumberdaya alam dan energi yang berwawasan lingkungan
	8. Peningkatan iklim investasi
	9. Peningkatan dan stimulasi promosi investasi industri pengolahan produk-produk pertanian serta sentra-sentra produksi
	10. Diversifikasi hasil produk-produk pertanian
	11. Pembangunan dan Pengembangan kawasan agropolitan dan agrominapolitan yang berbasis pada tanaman pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan
Kesenjangan pembangunan ekonomi antara kecamatan dan desa semakin dikurangi	1. Pembangunan dan pengembangan pusat-pusat perdagangan baru.

Tujuan	Sasaran
Misi III. Menciptakan Pemerataan Pembangunan Yang Berwawasan Lingkungan	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah sesuai dengan kebutuhan masyarakat	1. Tersusunnya perencanaan peraturan umum dan detail tata ruang di seluruh wilayah administrasi kabupaten Tulang Bawang Barat
	2. Pembangunan jaringan transportasi (peningkatan panjang jalan, jaringan transportasi dan infrastruktur transportasi)
	3. Pengembangan Jaringan listrik hingga menjangkau seluruh pelosok di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat
	4. Meningkatnya daya dukung telekomunikasi
	5. Pembangunan instalasi dan jaringan air bersih
	6. Peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan
	7. Peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana Kesehatan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan	1. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan

Pembangunan wilayahwilayah tertinggal dan kawasan strategis	1. Meningkatkan aksesibilitas
	2. Meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur pada kawasan tertinggal dan strategis
Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan	1. Pemantapan kawasan hutan
	2. Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan
	3. Peningkatan fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
	4. Pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan

Tujuan	Sasaran
Misi IV. Menciptakan Pemerintahan Yang Bersih dan Baik	
Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah sesuai dengan kebutuhan masyarakat	8. Tersusunnya perencanaan peraturan umum dan detail tata ruang di seluruh wilayah administrasi kabupaten Tulang Bawang Barat
	9. Pembangunan jaringan transportasi (peningkatan panjang jalan, jaringan transportasi dan infrastruktur transportasi)
	10. Pengembangan Jaringan listrik hingga menjangkau seluruh pelosok di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat
	11. Meningkatnya daya dukung telekomunikasi
	12. Pembangunan instalasi dan jaringan air bersih
	13. Peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan
	14. Peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana Kesehatan
Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan	2. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan
Pembangunan wilayahwilayah tertinggal dan kawasan strategis	3. Meningkatkan aksesibilitas
	4. Meningkatkan percepatan pembangunan infrastruktur pada kawasan tertinggal dan strategis

Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumberdaya Hutan	5. Pemantapan kawasan hutan
	6. Konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan
	7. Peningkatan fungsi dan Daya Dukung Daerah Aliran Sungai (DAS).
	8. Pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan

Tujuan	Sasaran
Misi V. Membangun Kehidupan Masyarakat Yang Religius, Berbudi Luhur, Berbudaya, Demokratis, Partisipatif dan Menjunjung Tinggi Supermasi Hukum	
Peningkatan kerukunan umat beragama	1. Terciptanya suasana aman tentram antar umat beragama
	2. Timbulnya kesepahaman antara masyarkat beragama untuk saling menjaga kerukunan beragama
peningkatan kepedulian dan rasa memiliki akan nilai nilai budaya	1. Optimalisasi pendataan kebudayaan
	2. meningkatnya sumberdaya manusia tentang kebudayaan
	3. terbangunnya sarana dan prasarana kebudayaan yang baru
Pembangunan Politik Lokal	1. Meningkatnya pendidikan politik masyarakat dan etika politik lokal berjalan baik
	2. Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan partai politik semakin baik
Penegakan Hukum dan Tata Peraturan Daerah	1. Meningkatnya pendayagunaan dan Tata Peraturan Daerah lebih optimal dan efektif
Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana	1. Kelembagaan perlindungan masyarakat, penanganan kerawanan sosial dan penanggulangan bencana semakin kuat dan berfungsi

Tabel 2.13.
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023 – 2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas hidup manusia (SDM) Kabupaten Tulang Bawang Barat.	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat;	Peningkatan akses layanan pendidikan masyarakat yang bermutu	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan PAUD dan pendidikan masyarakat kepada seluruh masyarakat secara adil dan merata
			Penjaminan layanan pendidikan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi seluruh penduduk untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat secara adil dan merata	Peningkatan pelayanan gizi masyarakat, kesehatan bayi, kesehatan anak dan remaja, serta kesehatan ibu dan reproduksi
			Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas dan terjangkau seluruh masyarakat
			Pemantapan implementasi system jaminan kesehatan masyarakat, khususnya penduduk miskin
			Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu tenaga kesehatan
Penurunan angka kesakitan dan kematian penduduk akibat penyakit menular, penyakit tidak menular melalui pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan			
Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan			

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Penurunan Pengangguran;	Meningkatkan kompetensi, sikap mental dan etos kerja angkatan kerja; Memperbaiki iklim ketenagakerjaan, serta penguatan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja	<p>Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja angkatan kerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk mencetak tenaga kerja dan wirausaha yang berdaya saing</p> <p>Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui pengembangan hubungan industrial yang harmonis dan peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta penegakkan hukum bidang ketenagakerjaan</p>
	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan serta Terpenuhi hak-hak anak;	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah	Peningkatan kualitas hidup, penurunan tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta peningkatan pemberdayaan perempuan dalam semua bidang pembangunan
		Penguatan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dalam kebijakan pembangunan	Penjaminan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang
Meningkatnya Perekonomian Kab. Tulang Bawang Barat;	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi	Penguatan pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan serta penguatan pangan.	Penguatan pembangunan sektor pertanian, peternakan dan perikanan sebagai sektor basis daerah serta untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat melalui peningkatan kapasitas produksi, daya saing, dan nilai tambah komoditi pertanian, peternakan dan perikanan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Menjaga stabilitas harga	Pengembangan sektor industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri)	<p>Mengembangkan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM), kawasan peruntukan industri sedang dan ataubesar, serta meningkatkan nilai tambah komoditi hasil pertanian</p> <p>Peningkatan kapasitas industry kecil dan menengah (IKM) pengolahan berbasis agro (Agroindustri) yang produktif, berdayasaing, tahan krisis, padat karya, serta berwawasan lingkungan</p>
	Menurunnya Kemiskinan	Meningkatkan jaminan kepastian, keamanan, kerjasamandan promosi investasi, serta peningkatan pelayanan prima perizinan dan non perizinan	<p>Peningkatan iklim penanaman modal yang berdayasaingdan percepatan realisasi penanaman modal</p> <p>Optimalisasi kerjasama investasi dan pelaksanaan kegiatanpromosi secara terfokus dan terintegrasi untuk memasarkan sektor- sektor prioritas daerah dan nasional</p> <p>Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana,dan utilitas pendukung perdagangan barang dan jasa untukmenjamin efisiensi dan kelancaran distribusi barang dan jasa kebutuhan pokok dan penting</p> <p>Penguatan implementasi elemen perlindungan konsumen (<i>commercial fairness</i>, standar, kemetrologian, pengawasanbarang beredar) untuk melindungi masyarakat dari produk-produk yang menyebabkan kerugian, membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan konsumen serta produsen dalam negeri terhindar dari praktek perdagangantidak sehat</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			<p>Meningkatkan produktivitas, kelayakan dan nilai tambah Koperasi dan UMKM, sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar dan berdaya saing tinggi</p> <p>Promosi yang terfokus dan optimalisasi pemanfaatan keragaman media promosi untuk memasarkan produk dan menumbuhkan minat wisatawan untuk berkunjung dan melakukan perjalanan ke daerah</p> <p>Peningkatan tatalaksana, penataan badan hukum, peningkatan kualitas dan kesehatan kelembagaan Koperasi</p> <p>Pembangunan daya tarik wisata, fasilitas wisata, aksesibilitas pariwisata, pemberdayaan masyarakat, dan investasi pariwisata khususnya wisata sejarah, budaya, dan wisata alam</p>
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup;	Meningkatnya Ketersediaan jalandan jembatan dalam kondisi mantap	Pemantapan sistem jaringan transportasi wilayah	<p>Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan jalan (jalan dan jembatan) untuk mendukung konektivitas antarwilayah.</p> <p>Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan prasarana, sarana (termasuk fasilitas) perhubungan untuk mendukung keterjangkauan layanan transportasi dan menjamin keselamatan, keamanan, dan kenyamanan transportasi.</p> <p>Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan utilitas dasar permukiman yang berkualitas, layak, sehat, dan terjangkau melalui pendekatan tanggap kebutuhan dan terpadu dengan sumber daya alam dan sumber daya air, serta dilaksanakan sesuai dengan tata bangunan dan ramah lingkungan.</p>

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan lingkungan,	Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkunganhidup	Menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dilakukan secara terpadu lintas sektoral dan lintas wilayah, didukung oleh kebijakan dan kerangka regulasi penataan ruang, SDM dan institusi berkualitas dan keterlibatan partisipasi masyarakat
Terwujudnya pemerintah yang bersih, akuntabel dan transparan;	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel dan Transparan	Peningkatan kualitas Reformasi birokrasi	Meningkatkan integritas dan kapasitas sumberdaya aparatur publik
			Meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik.
			Meningkatkan kapasitas SDM.
			Meningkatkan administrasi birokrasi.
			Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN secara adil dan wajar untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, nyaman, berbudaya dan demokratis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Internalisasi dan revitalisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat	Mewujudkan prilaku dan moral masyarakat yang baik dan berwawasan keagamaan
			Memperkuat kelembagaan demokrasi.
			Peningkatan keberdayaan masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	jumlah warisan Budaya yang dilindungi	Internalisasi dan revitalisasi nilai-nilai budaya daerah dalam kehidupan bermasyarakat	Peningkatan kesadaran, apresiasi, kreativitas dan pemahaman masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya

1.1.3 capaian kinerja makro;

Capaian Kinerja Makro Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 dan 2023

Capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Tahun 2022	Capaian Tahun 2023	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia	68.70	69,38	0,68
2	Angka Kemiskinan	7.44	7.25	-0,19
3	Angka Pengangguran	4.12	3.89	-0,23
4	Pertumbuhan Ekonomi	4.49	4.53	0,04
5	Pendapatan Per kapita	8737	9162	425
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,261	0,274	-0,013

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Tulang Bawang Barat

BAB II

RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

1 **Urusan Kesehatan**

1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
- d. Pelayanan Kesehatan Balita;
- e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
- f. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
- g. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi;
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
- j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat.
- k. Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis;
- l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya tahan Tubuh Manusia (HIV).

1.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	NILAI
		Indikator	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentasi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentasi Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentasi Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentasi Pelayanan Kesehatan Balita	100 %
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentasi Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100 %
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentasi Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100 %

NO.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	NILAI
		Indikator	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentasi Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentasi Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentasi Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentasi Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentasi Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Persentasi Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	100 %

Sumber : Dinas Kesehatan

Dari tabel di atas target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dari masing-masing indikator pada tahun 2023 adalah 100%.

1.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM bidang kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	TARGET DAERAH 2023 (%)	REALISASI 2023 (%)
		INDIKATOR		
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentasi Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %	89,67 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentasi Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100 %	93,98 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentasi Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %	92,73 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentasi Pelayanan Kesehatan Balita	100 %	83,31 %
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentasi Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100 %	98,35 %

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		TARGET DAERAH	REALISASI 2023 (%)
		INDIKATOR		2023 (%)	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentasi Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan pada Usia Produktif	100 %	69,34 %
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentasi Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan pada Usia Lanjut	100 %	82,12 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentasi Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Penderita Hipertensi	100 %	88,96 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Persentasi Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Pelayanan Penderita Diabetes Melitus (DM)	100 %	95,27 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Persentasi Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	100 %	97,32 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentasi Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Orang Terduga Tuberkulosis	100 %	96,25 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Persentasi Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	Pelayanan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	100 %	77,92 %

Sumber : Dinas Kesehatan

Dari tabel di atas, persentase realisasi pencapaian SPM untuk indikator jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebesar 89,67 %, jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebesar 93,98 %, jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebesar 92,73 %, jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 83,31 %, jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 98,35 %, jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 69,34 %, jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 82,12 %, jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan adalah 88,96 %, jumlah warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 95,27 %, jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat adalah sebesar 97,32 %, jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebanyak 96,25 % dan jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan layanan kesehatan adalah sebesar 77,92 %.

2. URUSAN PENDIDIKAN

2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar bidang urusan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- b. Pendidikan Dasar;
- c. Pendidikan Kesetaraan.

2.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	SPM		NILAI
				INDIKATOR	
1	Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.	Penerima Pelayanan Peserta Didik yang Berusia (5) Lima Tahun Sampai dengan (6) enam Tahun.	1	Persentase Penduduk Usia 5-6	100 %
2	Pendidikan Dasar	penerima pelayanan peserta didik yang berusia 7 Tujuh sampai dengan 15 tahun. (SD/Mi,SMP/MTs)	1	Persentase Penduduk Usia 7-15 tahun yang mendapatkan layanan (SD/Mi,SMP/MTs)	100 %
3	Pendidikan Kesetaraan	Penerimaan Pelayanan Peserta didik yang berusia (7) tujuh sampai dengan (18) Delapan Belas Tahun	1	Persentase Penduduk Usia 7-18 tahun yang mendapatkan layanan Pendidikan Kesetaraan	100 %

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa target pencapaian SPM pada bidang pendidikan, untuk jenis Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebesar 100 %, Pendidikan Dasar sebesar 100 %, Pendidikan Kesetaraan sebesar 100 %.

2.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM bidang Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	INDIKATOR PENCAPAIAN SPM	TARGET	REALISASI	TAHUN
1	Persentase Penduduk Usia 5-6	100%	93,47 %	2023
2	Persentase Penduduk Usia 7-15 tahun yang mendapatkan layanan Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100%	94,83 %	2023
3	Persentase Penduduk Usia 7-18 tahun yang mendapatkan layanan Pendidikan Kesetaraan	100%	94,66 %	2023

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Dari tabel di atas, realisasi pencapaian SPM bidang Pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan indikator pencapaian yaitu Persentase Penduduk Usia 5-6 dari jumlah target 100% orang atau capaian sebesar 93,47 % pada tahun 2023.

realisasi pencapaian SPM dengan indikator pencapaian yaitu Jumlah Persentase Penduduk Usia 7-15 tahun yang mendapatkan layanan Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs) adalah sebanyak 94,83 % orang dari jumlah target 100% orang atau capaian sebesar 94,83 % pada tahun 2023.

realisasi pencapaian untuk indikator Jumlah Persentase Penduduk Usia 7-18 tahun yang mendapatkan layanan Pendidikan Kesetaraan adalah sebanyak 94,66 % orang dengan target 100% orang atau capaian sebesar 94,66 % pada tahun 2023.

3 URUSAN SOSIAL

3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar bidang Sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti;

- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Alam dan Sosial daerah kabupaten/kota.

3.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Nilai	Batas Waktu Pencapaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social	100 %	2023
2	Rehabilitasi Sosial Dasar anak di Luar Panti skala kab/kota	Jumlah anak Terlantar di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social	100 %	2023
3	Rehabilitasi Sosial lanjut usia di Luar Panti skala kab/kota	Jumlah lanjut usia Terlantar di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social	100 %	2023
4	Rehabilitasi Sosial gelandangan /pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Jumlah gelandangan /pengemis di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social	100 %	2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Nilai	Batas Waktu Pencapaian
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana	Jumlah Kejadian bencana yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi Korban Bencana	100 %	2023

Sumber : Dinas Sosial

Dari tabel di atas, target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan sosial yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 dari jenis pelayanan dasar Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti dengan target 100%, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti dengan target 85%, Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti dengan target 93 %, Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti dengan target 100% & Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat Tanggap dan Paska Bencana bagi Korban Bencana Alam dan Sosial daerah kabupaten/kota dengan target 100%.

3.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Indikator Pencapaian SPM	Target Pencapaian	Realisasi	Tahun
1	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social	100%	100 %	2023
2	Jumlah anak Terlantar di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social	100%	100 %	2023
3	Jumlah lanjut usia Terlantar di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social	100%	100 %	2023
4	Jumlah gelandangan /pengemis di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social	100%	100 %	2023
5	Jumlah Kejadian bencana yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi	100%	100 %	2023

Sumber : Dinas Sosial

Dari tabel di atas, persentase pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 dengan indikator Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social sebesar 100 %, Jumlah anak Terlantar di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social sebesar 100%, Jumlah lanjut usia Terlantar di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social sebesar 100 %, Jumlah gelandangan /pengemis di Luar Panti yang memperoleh pelayanan rehab social sebesar 100%, Jumlah Kejadian bencana yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat bagi sebesar 100%.

4 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS

4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- e. Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

4.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target capaian	Tahun
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	2023
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	2023

3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2023
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2023
5	Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah Warga Negara yg memperoleh layanan penyelamatan & evakuasi korban kebakaran	100%	2023

Sumber : OPD URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 dengan jenis pelayanan dasar Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, Pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran masing-masing adalah 100%.

4.3 Realisasi

Realisasi pencapaian SPM pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Tahun
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100 %	100%	2023
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Tahun
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	2023
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	2023
	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran	100%	100%	2023

Sumber : OPD URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN LINMAS

Dari tabel diatas Realisasi pencapaian SPM pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 untuk indikator Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum terlaksana 100%, indikator Pelayanan informasi rawan bencana sebanyak 158 orang, indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebanyak 85 orang, indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebanyak 334 orang. Sedangkan, untuk indikator Cakupan pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran sebanyak 107 Kejadian.

5 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal, jenis pelayanan dasar bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

- a. Penyediaan Kebutuhan Pokok AirMinum Sehari-hari;
- b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Airlimbah Domestik.

5.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan pekerjaan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Tahun	
		Indikator	Target		
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	1	Tersedianya Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	2023
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	1	Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	100 %	2023

Sumber : Dinas PUPR

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang urusan pekerjaan umum dan Tata Ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 untuk indikator Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan target 100%, Penyediaan Pelayanan Pengolahan Airlimbah domestik dengan target 100%.

4.5.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM bidang pekerjaan umum di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Target Daerah 2023	Realisasi Tahun 2023
		Indikator	Capaian		
1	Pengelolaan dan Operasional Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1	jumlah sistem penyediaan air minum (SPAM) yang terpelihara	100%	55,42%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Airlimbah domestik	2	Presentase Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan AirLimbah Domestik	100%	66,43%

Sumber : Dinas PUPR

Dari tabel di atas Realisasi Pencapaian SPM bidang pekerjaan umum dan Tata Ruang di Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 untuk jenis pelayanan dasar Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari tercapai 55,42%, Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik tercapai 66,43%.

6 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar bidang perumahan rakyat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut:

- a. Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6.2 Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang perumahan rakyat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Target
			Indikator	
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	Persentase Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat terkena Bencana	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	Persentase Tersedianya Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah	100%

Sumber : Dinas Perkimta

Dari tabel di atas target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang perumahan rakyat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 untuk jenis pelayanan dasar penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota dengan Target 100% dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 100%.

6.3 Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Realisasi Tahun 2023
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat terkena Bencana	100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah	100%

Sumber : Dinas Perkimta

Dari tabel di atas target pencapaian standar pelayanan minimal pada bidang perumahan rakyat yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023 untuk jenis pelayanan dasar penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota adalah 100% dan Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah 100%.

BAB III

HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. **Reviu EKPPD Tim Daerah Provinsi Lampung Terhadap LPPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2023**

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, salah satunya adalah dengan melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) berdasarkan dari LPPD yang disusun.

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut:

1. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 yaitu dengan skor 2.9726 atau dengan kategori prestasi Tinggi;
2. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 yaitu dengan skor 3.082 atau dengan kategori prestasi Sangat Tinggi;
3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 yaitu dengan skor 3.1574 atau dengan kategori prestasi Sangat Tinggi;
4. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019 tidak ada dikarenakan masih dalam keadaan Pandemi Covid-19;
5. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 tidak ada dikarenakan masih dalam keadaan Pandemi Covid-19;
6. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 yaitu dengan skor 2,82 atau dengan kategori prestasi Sedang;
7. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 yaitu dengan skor 3,3147 atau dengan kategori prestasi Sedang;

2. Opini Atas Laporan Keuangan Daerah

a. Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan hasil Audit atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat oleh Badan Pemeriksa Keuangan selama 10 Tahun terakhir didapatkan hasil opini sebagai berikut:

NO	URAIAN	OPINI LAPORAN KEUANGAN DAERAH
1	Opini BPK atas LKD Tahun 2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	Opini BPK atas LKD Tahun 2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	Opini BPK atas LKD Tahun 2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	Opini BPK atas LKD Tahun 2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	Opini BPK atas LKD Tahun 2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	Opini BPK atas LKD Tahun 2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7	Opini BPK atas LKD Tahun 2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8	Opini BPK atas LKD Tahun 2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
9	Opini BPK atas LKD Tahun 2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
10	Opini BPK atas LKD Tahun 2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2014 sampai dengan 2023 laporan keuangan Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Opini BPK atas pemeriksaan LKPD Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dari opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah terlaksana secara baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPD yaitu opini WTP. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat berkomitmen akan memperbaiki kinerja keuangan daerah sesuai dengan catatan yang telah dilakukan oleh BPK.

BAB IV
REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
4	PENDAPATAN DAERAH	902.801.135.455,29	856.716.964.221,29	(46.084.171.234,00)	94,90
4.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	14.622.930.000,00	13.773.499.960,80	(849.430.039,20)	94,19
4.1.02	KESEHATAN	13.757.930.000,00	13.146.673.061,80	(611.256.938,20)	95,56
4.1.02.1-02.0-00.0-00.01	DINAS KESEHATAN	13.757.930.000,00	13.146.673.061,80	(611.256.938,20)	95,56
4.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	865.000.000,00	626.826.899,00	(238.173.101,00)	72,47
4.1.03.1-03.0-00.0-00.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	865.000.000,00	626.826.899,00	(238.173.101,00)	72,47
4.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.629.467.200,00	1.680.361.650,00	(949.105.550,00)	63,91
4.2.11	LINGKUNGAN HIDUP	341.467.200,00	449.088.000,00	107.620.800,00	131,52
4.2.11.2-11.0-00.0-00.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	341.467.200,00	449.088.000,00	107.620.800,00	131,52
4.2.15	PERHUBUNGAN	265.000.000,00	183.255.000,00	(81.745.000,00)	69,15
4.2.15.2-15.0-00.0-00.01	DINAS PERHUBUNGAN	265.000.000,00	183.255.000,00	(81.745.000,00)	69,15
4.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	217.000.000,00	219.264.150,00	2.264.150,00	101,04
4.2.16.2-16.2-20.2-21.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	217.000.000,00	219.264.150,00	2.264.150,00	101,04
4.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	1.796.000.000,00	828.754.500,00	(967.245.500,00)	46,14
4.2.17.2-17.3-31.3-30.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1.796.000.000,00	828.754.500,00	(967.245.500,00)	46,14
4.2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0
4.2.19.2-19.3-26.0-00.01	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	10.000.000,00	0,00	(10.000.000,00)	0
4.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	885.548.738.255,29	841.263.102.610,49	(44.285.635.644,80)	95,00
4.5.02	KEUANGAN	885.548.738.255,29	841.263.102.610,49	(44.285.635.644,80)	95,00
4.5.02.5-02.0-00.0-00.01	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	859.183.738.255,29	814.651.854.564,04	(44.531.883.691,25)	94,82
4.5.02.5-02.0-00.0-00.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	26.365.000.000,00	26.611.248.046,45	246.248.046,45	100,93
5	BELANJA DAERAH	853.311.929.437,56	789.077.180.587,07	(64.234.748.850,49)	92,47
5.1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	481.210.973.860,00	445.013.124.776,07	(36.197.849.083,93)	92,48
5.1.01	PENDIDIKAN	248.254.222.757,00	239.254.438.342,68	(8.999.784.414,32)	96,37
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	248.254.222.757,00	239.254.438.342,68	(8.999.784.414,32)	96,37
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	231.063.389.907,00	222.663.762.833,68	(8.399.627.073,32)	96,36
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	184.857.491.157,00	182.206.214.986,68	(2.651.276.170,32)	98,57
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	41.204.598.750,00	35.459.847.847,00	(5.744.750.903,00)	86,06
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	5.001.300.000,00	4.997.700.000,00	(3.600.000,00)	99,93
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2	BELANJA MODAL	17.190.832.850,00	16.590.675.509,00	(600.157.341,00)	96,51
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.787.030.000,00	3.887.550.839,00	(1.899.479.161,00)	67,18
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	9.721.234.850,00	9.719.349.150,00	(1.885.700,00)	99,98
5.1.01.1-01.2-22.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.682.568.000,00	2.983.775.520,00	1.301.207.520,00	177,33
5.1.02	KESEHATAN	94.504.851.595,00	85.988.157.034,39	(8.516.694.560,61)	90,99

5.1.02.1-02.0-00.0-00.01	DINAS KESEHATAN	94.504.851.595,00	85.988.157.034,39	(8.516.694.560,61)	90,99
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	87.879.948.192,00	79.738.683.915,39	(8.141.264.276,61)	90,74
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	38.791.292.610,00	38.374.273.389,00	(417.019.221,00)	98,92
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	48.988.655.582,00	41.264.410.526,39	(7.724.245.055,61)	84,23
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	6.624.903.403,00	6.249.473.119,00	(375.430.284,00)	94,33
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	6.547.005.400,00	6.176.259.346,00	(370.746.054,00)	94,34
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.000.000,00	61.115.770,00	(3.884.230,00)	94,02
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.798.003,00	3.798.003,00	0,00	100,00
5.1.02.1-02.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.100.000,00	8.300.000,00	(800.000,00)	91,21
5.1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	114.169.209.483,00	98.034.273.545,00	(16.134.935.938,00)	85,87
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	114.169.209.483,00	98.034.273.545,00	(16.134.935.938,00)	85,87
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	24.023.994.933,00	21.121.019.862,00	(2.902.975.071,00)	87,92
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.001.238.483,00	3.905.615.961,00	(95.622.522,00)	97,61
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.497.311.390,00	9.989.431.001,00	(2.507.880.389,00)	79,93
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	7.525.445.060,00	7.225.972.900,00	(299.472.160,00)	96,02
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	90.145.214.550,00	76.913.253.683,00	(13.231.960.867,00)	85,32
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	227.500.000,00	227.068.500,00	(431.500,00)	99,81
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.144.960.272,00	11.890.484.690,00	(254.475.582,00)	97,90
5.1.03.1-03.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.772.754.278,00	64.795.700.493,00	(12.977.053.785,00)	83,31
5.1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.891.985.659,00	3.912.056.726,00	(1.979.928.933,00)	66,40
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	5.891.985.659,00	3.912.056.726,00	(1.979.928.933,00)	66,40
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.899.010.659,00	3.797.377.806,00	(1.101.632.853,00)	77,51
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.385.885.759,00	2.282.764.750,00	(103.121.009,00)	95,68
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.513.124.900,00	1.514.613.056,00	(998.511.844,00)	60,27
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2	BELANJA MODAL	992.975.000,00	114.678.920,00	(878.296.080,00)	11,55
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.01	Belanja Modal Tanah	777.205.000,00	114.678.920,00	(662.526.080,00)	14,76
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.770.000,00	0,00	(35.770.000,00)	0
5.1.04.1-04.2-10.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	180.000.000,00	0,00	(180.000.000,00)	0
5.1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	12.608.518.213,00	12.188.807.843,00	(419.710.370,00)	96,67
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2.645.931.314,00	2.445.720.345,00	(200.210.969,00)	92,43
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	2.631.051.314,00	2.430.840.345,00	(200.210.969,00)	92,39
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.712.071.314,00	1.663.674.345,00	(48.396.969,00)	97,17
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	918.980.000,00	767.166.000,00	(151.814.000,00)	83,48
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	100,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00	100,00
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	3.774.396.124,00	3.688.140.306,00	(86.255.818,00)	97,71
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	2.831.896.124,00	2.747.640.306,00	(84.255.818,00)	97,02
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	1.225.170.124,00	1.178.210.893,00	(46.959.231,00)	96,17
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.606.726.000,00	1.569.429.413,00	(37.296.587,00)	97,68

5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	942.500.000,00	940.500.000,00	(2.000.000,00)	99,79
5.1.05.1-05.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	942.500.000,00	940.500.000,00	(2.000.000,00)	99,79
5.1.05.1-05.0-00.0-00.03	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	6.188.190.775,00	6.054.947.192,00	(133.243.583,00)	97,85
5.1.05.1-05.0-00.0-00.03.1	BELANJA OPERASI	6.159.110.775,00	6.026.102.192,00	(133.008.583,00)	97,84
5.1.05.1-05.0-00.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	1.817.542.775,00	1.802.844.208,00	(14.698.567,00)	99,19
5.1.05.1-05.0-00.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.341.568.000,00	4.223.257.984,00	(118.310.016,00)	97,27
5.1.05.1-05.0-00.0-00.03.2	BELANJA MODAL	29.080.000,00	28.845.000,00	(235.000,00)	99,19
5.1.05.1-05.0-00.0-00.03.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.080.000,00	28.845.000,00	(235.000,00)	99,19
5.1.06	SOSIAL	5.782.186.153,00	5.635.391.285,00	(146.794.868,00)	97,46
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01	DINAS SOSIAL	5.782.186.153,00	5.635.391.285,00	(146.794.868,00)	97,46
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	5.782.186.153,00	5.635.391.285,00	(146.794.868,00)	97,46
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.421.407.153,00	2.383.209.890,00	(38.197.263,00)	98,42
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.075.779.000,00	971.181.395,00	(104.597.605,00)	90,28
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	100,00
5.1.06.1-06.0-00.0-00.01.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.035.000.000,00	2.031.000.000,00	(4.000.000,00)	99,80
5.2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	60.081.448.828,00	52.264.410.156,00	(7.817.038.672,00)	86,99
5.2.08	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.121.561.660,00	2.848.618.114,00	(272.943.546,00)	91,26
5.2.08.2-08.0-00.0-00.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.121.561.660,00	2.848.618.114,00	(272.943.546,00)	91,26
5.2.08.2-08.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.094.061.660,00	2.848.618.114,00	(245.443.546,00)	92,07
5.2.08.2-08.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.777.795.660,00	1.696.562.701,00	(81.232.959,00)	95,43
5.2.08.2-08.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.166.266.000,00	1.002.055.413,00	(164.210.587,00)	85,92
5.2.08.2-08.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
5.2.08.2-08.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	0
5.2.08.2-08.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.500.000,00	0,00	(27.500.000,00)	0
5.2.09	PANGAN	2.196.673.316,00	1.966.705.241,00	(229.968.075,00)	89,53
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01	DINAS KETAHANAN PANGAN	2.196.673.316,00	1.966.705.241,00	(229.968.075,00)	89,53
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	2.196.673.316,00	1.966.705.241,00	(229.968.075,00)	89,53
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.584.827.316,00	1.529.415.790,00	(55.411.526,00)	96,50
5.2.09.2-09.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	611.846.000,00	437.289.451,00	(174.556.549,00)	71,47
5.2.11	LINGKUNGAN HIDUP	4.885.020.122,00	4.358.807.199,00	(526.212.923,00)	89,23
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	4.885.020.122,00	4.358.807.199,00	(526.212.923,00)	89,23
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.820.020.122,00	4.324.007.199,00	(496.012.923,00)	89,71
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.299.890.122,00	2.241.591.395,00	(58.298.727,00)	97,47
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.485.130.000,00	2.047.515.804,00	(437.614.196,00)	82,39
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	35.000.000,00	34.900.000,00	(100.000,00)	99,71
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	65.000.000,00	34.800.000,00	(30.200.000,00)	53,54
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	34.800.000,00	(200.000,00)	99,43
5.2.11.2-11.0-00.0-00.01.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	0
5.2.12	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.665.658.307,00	3.417.247.805,00	(248.410.502,00)	93,22
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.665.658.307,00	3.417.247.805,00	(248.410.502,00)	93,22

5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.503.883.307,00	3.255.484.805,00	(248.398.502,00)	92,91
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.127.468.307,00	2.056.833.842,00	(70.634.465,00)	96,68
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.376.415.000,00	1.198.650.963,00	(177.764.037,00)	87,08
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	161.775.000,00	161.763.000,00	(12.000,00)	99,99
5.2.12.2-12.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.775.000,00	161.763.000,00	(12.000,00)	99,99
5.2.13	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.926.889.625,00	3.826.236.790,00	(100.652.835,00)	97,44
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN TIYUH	3.926.889.625,00	3.826.236.790,00	(100.652.835,00)	97,44
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.891.889.625,00	3.791.496.790,00	(100.392.835,00)	97,42
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.214.875.625,00	2.158.473.510,00	(56.402.115,00)	97,45
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.627.014.000,00	1.583.023.280,00	(43.990.720,00)	97,30
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	100,00
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	35.000.000,00	34.740.000,00	(260.000,00)	99,26
5.2.13.2-13.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.000.000,00	34.740.000,00	(260.000,00)	99,26
5.2.14	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.438.670.148,00	6.754.689.492,00	(683.980.656,00)	90,81
5.2.14.2-14.0-00.0-00.01	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.438.670.148,00	6.754.689.492,00	(683.980.656,00)	90,81
5.2.14.2-14.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	7.339.470.148,00	6.754.689.492,00	(584.780.656,00)	92,03
5.2.14.2-14.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.967.179.148,00	1.866.468.492,00	(100.710.656,00)	94,88
5.2.14.2-14.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.012.291.000,00	4.535.751.000,00	(476.540.000,00)	90,49
5.2.14.2-14.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	360.000.000,00	352.470.000,00	(7.530.000,00)	97,91
5.2.14.2-14.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	99.200.000,00	0,00	(99.200.000,00)	0
5.2.14.2-14.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.200.000,00	0,00	(99.200.000,00)	0
5.2.15	PERHUBUNGAN	4.120.819.691,00	3.698.526.714,00	(422.292.977,00)	89,75
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01	DINAS PERHUBUNGAN	4.120.819.691,00	3.698.526.714,00	(422.292.977,00)	89,75
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.120.819.691,00	3.698.526.714,00	(422.292.977,00)	89,75
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.199.117.691,00	2.180.181.180,00	(18.936.511,00)	99,14
5.2.15.2-15.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.921.702.000,00	1.518.345.534,00	(403.356.466,00)	79,01
5.2.16	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	11.673.203.023,00	8.921.347.066,00	(2.751.855.957,00)	76,43
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.673.203.023,00	8.921.347.066,00	(2.751.855.957,00)	76,43
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1	BELANJA OPERASI	11.401.453.023,00	8.975.197.066,00	(2.426.255.957,00)	78,72
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.01	Belanja Pegawai	1.807.853.023,00	1.779.618.888,00	(28.234.135,00)	98,44
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.443.600.000,00	7.045.578.178,00	(2.398.021.822,00)	74,61
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2	BELANJA MODAL	271.750.000,00	-53.850.000,00	(325.600.000,00)	0
5.2.16.2-16.2-20.2-21.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	271.750.000,00	-53.850.000,00	(325.600.000,00)	0
5.2.17	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.788.989.422,00	4.398.857.506,00	(1.390.131.916,00)	75,99
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.788.989.422,00	4.398.857.506,00	(1.390.131.916,00)	75,99
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.1	BELANJA OPERASI	5.786.289.422,00	4.398.857.506,00	(1.387.431.916,00)	76,02
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.1.01	Belanja Pegawai	2.335.877.422,00	2.237.596.580,00	(98.280.842,00)	95,79
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.450.412.000,00	2.161.260.926,00	(1.289.151.074,00)	62,64
5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.2	BELANJA MODAL	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	0

5.2.17.2-17.3-31.3-30.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.700.000,00	0,00	(2.700.000,00)	0
5.2.18	PENANAMAN MODAL	5.489.718.537,00	4.934.760.702,00	(554.957.835,00)	89,89
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	5.489.718.537,00	4.934.760.702,00	(554.957.835,00)	89,89
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.647.880.937,00	4.106.020.702,00	(541.860.235,00)	88,34
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	3.205.526.537,00	2.970.391.772,00	(235.134.765,00)	92,66
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.442.354.400,00	1.135.628.930,00	(306.725.470,00)	78,73
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	841.837.600,00	828.740.000,00	(13.097.600,00)	98,44
5.2.18.2-18.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	841.837.600,00	828.740.000,00	(13.097.600,00)	98,44
5.2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	3.774.674.104,00	3.697.493.032,00	(77.181.072,00)	97,96
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	3.774.674.104,00	3.697.493.032,00	(77.181.072,00)	97,96
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.774.674.104,00	3.697.493.032,00	(77.181.072,00)	97,96
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.043.506.104,00	2.025.215.783,00	(18.290.321,00)	99,10
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	731.168.000,00	672.277.249,00	(58.890.751,00)	91,95
5.2.19.2-19.3-26.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
5.2.23	PERPUSTAKAAN	3.999.570.873,00	3.441.120.495,00	(558.450.378,00)	86,04
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.999.570.873,00	3.441.120.495,00	(558.450.378,00)	86,04
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.006.579.873,00	2.629.055.470,00	(377.524.403,00)	87,44
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.110.695.873,00	2.009.402.046,00	(101.293.827,00)	95,20
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	895.884.000,00	619.653.424,00	(276.230.576,00)	69,17
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2	BELANJA MODAL	992.991.000,00	812.065.025,00	(180.925.975,00)	81,78
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	758.600.000,00	595.660.825,00	(162.939.175,00)	78,52
5.2.23.2-23.2-24.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	234.391.000,00	216.404.200,00	(17.986.800,00)	92,33
5.3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12.594.133.328,00	11.258.997.567,00	(1.335.135.761,00)	89,40
5.3.25	KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.291.668.256,00	2.076.233.423,00	(215.434.833,00)	90,60
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01	DINAS PERIKANAN	2.291.668.256,00	2.076.233.423,00	(215.434.833,00)	90,60
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	1.971.203.256,00	1.789.048.831,00	(182.154.425,00)	90,76
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.419.182.256,00	1.358.646.456,00	(60.535.800,00)	95,73
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	552.021.000,00	430.402.375,00	(121.618.625,00)	77,97
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	320.465.000,00	287.184.592,00	(33.280.408,00)	89,61
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	170.465.000,00	149.525.000,00	(20.940.000,00)	87,72
5.3.25.3-25.0-00.0-00.01.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150.000.000,00	137.659.592,00	(12.340.408,00)	91,77
5.3.27	PERTANIAN	8.289.823.911,00	7.332.500.182,00	(957.323.729,00)	88,45
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	3.548.677.574,00	3.186.563.512,00	(362.114.062,00)	89,80
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	3.413.927.574,00	3.176.590.512,00	(237.337.062,00)	93,05
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.189.635.574,00	2.157.888.326,00	(31.747.248,00)	98,55
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.161.292.000,00	956.002.186,00	(205.289.814,00)	82,32
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	63.000.000,00	62.700.000,00	(300.000,00)	99,52
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	134.750.000,00	9.973.000,00	(124.777.000,00)	7,40
5.3.27.3-27.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	134.750.000,00	9.973.000,00	(124.777.000,00)	7,40
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	4.741.146.337,00	4.145.936.670,00	(595.209.667,00)	87,45

5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	4.716.046.337,00	4.143.376.670,00	(572.669.667,00)	87,86
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	3.581.480.337,00	3.423.010.697,00	(158.469.640,00)	95,58
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.134.566.000,00	720.365.973,00	(414.200.027,00)	63,49
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	25.100.000,00	2.560.000,00	(22.540.000,00)	10,20
5.3.27.3-27.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.100.000,00	2.560.000,00	(22.540.000,00)	10,20
5.3.32	TRANSMIGRASI	2.012.641.161,00	1.850.263.962,00	(162.377.199,00)	91,93
5.3.32.3-32.2-07.0-00.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.012.641.161,00	1.850.263.962,00	(162.377.199,00)	91,93
5.3.32.3-32.2-07.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	2.012.641.161,00	1.850.263.962,00	(162.377.199,00)	91,93
5.3.32.3-32.2-07.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.564.765.161,00	1.522.758.282,00	(42.006.879,00)	97,32
5.3.32.3-32.2-07.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	447.876.000,00	327.505.680,00	(120.370.320,00)	73,12
5.4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	73.455.760.347,00	67.886.247.685,00	(5.569.512.662,00)	92,42
5.4.01	SEKRETARIAT DAERAH	34.792.222.511,00	31.339.392.631,00	(3.452.829.880,00)	90,08
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01	SEKRETARIAT DAERAH	34.792.222.511,00	31.339.392.631,00	(3.452.829.880,00)	90,08
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	33.556.272.511,00	30.894.397.631,00	(2.661.874.880,00)	92,07
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	12.621.506.566,00	11.874.109.934,00	(747.396.632,00)	94,08
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	19.878.190.000,00	17.963.711.752,00	(1.914.478.248,00)	90,37
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	1.056.575.945,00	1.056.575.945,00	0,00	100,00
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.235.950.000,00	444.995.000,00	(790.955.000,00)	36,00
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.214.950.000,00	434.095.000,00	(780.855.000,00)	35,73
5.4.01.4-01.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	21.000.000,00	10.900.000,00	(10.100.000,00)	51,90
5.4.02	SEKRETARIAT DPRD	38.663.537.836,00	36.546.855.054,00	(2.116.682.782,00)	94,53
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	38.663.537.836,00	36.546.855.054,00	(2.116.682.782,00)	94,53
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	37.513.857.836,00	36.110.265.054,00	(1.403.592.782,00)	96,26
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	15.349.967.836,00	15.136.623.158,00	(213.344.678,00)	98,61
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.163.890.000,00	20.973.641.896,00	(1.190.248.104,00)	94,63
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	1.149.680.000,00	436.590.000,00	(713.090.000,00)	37,97
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.131.680.000,00	418.650.000,00	(713.030.000,00)	36,99
5.4.02.4-02.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.000.000,00	17.940.000,00	(60.000,00)	99,67
5.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	182.818.197.504,56	171.134.844.780,00	(11.683.352.724,56)	93,61
5.5.01	PERENCANAAN	9.336.012.366,00	8.758.407.949,00	(577.604.417,00)	93,81
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	9.336.012.366,00	8.758.407.949,00	(577.604.417,00)	93,81
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	9.245.352.366,00	8.679.157.949,00	(566.194.417,00)	93,88
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	4.501.252.366,00	4.409.425.504,00	(91.826.862,00)	97,96
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.744.100.000,00	4.269.732.445,00	(474.367.555,00)	90,00
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2	BELANJA MODAL	90.660.000,00	79.250.000,00	(11.410.000,00)	87,41
5.5.01.5-01.5-05.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	90.660.000,00	79.250.000,00	(11.410.000,00)	87,41
5.5.02	KEUANGAN	168.682.841.155,56	158.383.367.184,00	(10.299.473.971,56)	93,89
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	164.017.446.144,56	154.044.014.856,00	(9.973.431.288,56)	93,92
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	23.163.057.087,56	22.994.405.587,00	(168.651.500,56)	99,27
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	11.474.078.354,56	11.338.579.817,00	(135.498.537,56)	98,82

5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.084.300.000,00	6.051.168.963,00	(33.131.037,00)	99,46
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.03	Belanja Bunga	5.604.678.733,00	5.604.656.807,00	(21.926,00)	100,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	388.700.000,00	382.083.546,00	(6.616.454,00)	98,30
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	371.700.000,00	365.122.434,00	(6.577.566,00)	98,23
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.000.000,00	16.961.112,00	(38.888,00)	99,77
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	106.353.000,00	(893.647.000,00)	10,64
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	106.353.000,00	(893.647.000,00)	10,64
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4	BELANJA TRANSFER	139.465.689.057,00	130.561.172.723,00	(8.904.516.334,00)	93,62
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.446.117.473,00	0,00	(4.446.117.473,00)	0
5.5.02.5-02.0-00.0-00.01.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	135.019.571.584,00	130.561.172.723,00	(4.458.398.861,00)	96,70
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02	BADAN PENDAPATAN DAERAH	4.665.395.011,00	4.339.352.328,00	(326.042.683,00)	93,01
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	4.655.395.011,00	4.329.452.328,00	(325.942.683,00)	93,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	3.056.599.011,00	2.871.649.517,00	(184.949.494,00)	93,95
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.598.796.000,00	1.457.802.811,00	(140.993.189,00)	91,18
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00
5.5.02.5-02.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000,00	9.900.000,00	(100.000,00)	99,00
5.5.03	KEPEGAWAIAN	4.799.343.983,00	3.993.069.647,00	(806.274.336,00)	83,20
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	4.799.343.983,00	3.993.069.647,00	(806.274.336,00)	83,20
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	4.713.343.983,00	3.989.094.647,00	(724.249.336,00)	84,63
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	2.571.985.983,00	2.467.835.632,00	(104.150.351,00)	95,95
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.141.358.000,00	1.521.259.015,00	(620.098.985,00)	71,04
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2	BELANJA MODAL	86.000.000,00	3.975.000,00	(82.025.000,00)	4,62
5.5.03.5-03.5-04.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.000.000,00	3.975.000,00	(82.025.000,00)	4,62
5.6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	10.164.397.616,00	9.647.306.506,00	(517.091.110,00)	94,91
5.6.01	INSPEKTORAT	10.164.397.616,00	9.647.306.506,00	(517.091.110,00)	94,91
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01	INSPEKTORAT DAERAH	10.164.397.616,00	9.647.306.506,00	(517.091.110,00)	94,91
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	10.095.897.616,00	9.639.806.506,00	(456.091.110,00)	95,48
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	7.466.091.616,00	7.399.391.556,00	(66.700.060,00)	99,11
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.479.806.000,00	2.090.414.950,00	(389.391.050,00)	84,30
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	100,00
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2	BELANJA MODAL	68.500.000,00	7.500.000,00	(61.000.000,00)	10,95
5.6.01.6-01.0-00.0-00.01.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.500.000,00	7.500.000,00	(61.000.000,00)	10,95
5.7	UNSUR KEWILAYAHAN	14.813.469.165,00	14.263.998.058,00	(549.471.107,00)	96,29
5.7.01	KECAMATAN	14.813.469.165,00	14.263.998.058,00	(549.471.107,00)	96,29
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01	KECAMATAN TUMIJAJAR	2.540.123.965,00	2.480.502.606,00	(59.621.359,00)	97,65
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	2.540.123.965,00	2.480.502.606,00	(59.621.359,00)	97,65
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.871.383.965,00	1.841.693.106,00	(29.690.859,00)	98,41
5.7.01.7-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	668.740.000,00	638.809.500,00	(29.930.500,00)	95,52
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02	KECAMATAN PAGAR DEWA	950.009.319,00	893.056.720,00	(56.952.599,00)	94,01
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1	BELANJA OPERASI	929.009.319,00	878.182.720,00	(50.826.599,00)	94,53

5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.01	Belanja Pegawai	692.369.319,00	692.078.720,00	(290.599,00)	99,96
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.640.000,00	186.104.000,00	(50.536.000,00)	78,64
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2	BELANJA MODAL	21.000.000,00	14.874.000,00	(6.126.000,00)	70,83
5.7.01.7-01.0-00.0-00.02.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.000.000,00	14.874.000,00	(6.126.000,00)	70,83
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03	KECAMATAN GUNUNG TERANG	1.288.363.801,00	1.210.819.956,00	(77.543.845,00)	93,98
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1	BELANJA OPERASI	1.269.863.801,00	1.197.319.956,00	(72.543.845,00)	94,29
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.01	Belanja Pegawai	1.049.363.801,00	1.001.519.956,00	(47.843.845,00)	95,44
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.1.02	Belanja Barang dan Jasa	220.500.000,00	195.800.000,00	(24.700.000,00)	88,80
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2	BELANJA MODAL	18.500.000,00	13.500.000,00	(5.000.000,00)	72,97
5.7.01.7-01.0-00.0-00.03.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.500.000,00	13.500.000,00	(5.000.000,00)	72,97
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04	KECAMATAN GUNUNG AGUNG	1.404.742.233,00	1.364.573.412,00	(40.168.821,00)	97,14
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1	BELANJA OPERASI	1.386.742.233,00	1.346.673.412,00	(40.068.821,00)	97,11
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.01	Belanja Pegawai	1.144.792.233,00	1.114.417.170,00	(30.375.063,00)	97,35
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.1.02	Belanja Barang dan Jasa	241.950.000,00	232.256.242,00	(9.693.758,00)	95,99
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2	BELANJA MODAL	18.000.000,00	17.900.000,00	(100.000,00)	99,44
5.7.01.7-01.0-00.0-00.04.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	18.000.000,00	17.900.000,00	(100.000,00)	99,44
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05	KECAMATAN LAMBU KIBANG	1.419.415.937,00	1.382.190.275,00	(37.225.662,00)	97,38
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1	BELANJA OPERASI	1.411.915.937,00	1.374.690.275,00	(37.225.662,00)	97,36
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.01	Belanja Pegawai	1.175.915.937,00	1.149.968.053,00	(25.947.884,00)	97,79
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.000.000,00	224.722.222,00	(11.277.778,00)	95,22
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2	BELANJA MODAL	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.05.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06	KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK	1.476.403.632,00	1.438.101.097,00	(38.302.535,00)	97,41
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1	BELANJA OPERASI	1.476.403.632,00	1.438.101.097,00	(38.302.535,00)	97,41
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.01	Belanja Pegawai	1.216.533.632,00	1.200.052.097,00	(16.481.535,00)	98,65
5.7.01.7-01.0-00.0-00.06.1.02	Belanja Barang dan Jasa	259.870.000,00	238.049.000,00	(21.821.000,00)	91,60
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07	KECAMATAN BATU PUTIH	999.370.246,00	941.383.077,00	(57.987.169,00)	94,20
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1	BELANJA OPERASI	978.595.246,00	935.483.077,00	(43.112.169,00)	95,59
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.01	Belanja Pegawai	754.730.246,00	719.940.037,00	(34.790.209,00)	95,39
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.1.02	Belanja Barang dan Jasa	223.865.000,00	215.543.040,00	(8.321.960,00)	96,28
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2	BELANJA MODAL	20.775.000,00	5.900.000,00	(14.875.000,00)	28,40
5.7.01.7-01.0-00.0-00.07.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.775.000,00	5.900.000,00	(14.875.000,00)	28,40
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08	KECAMATAN WAY KENANGA	1.409.111.385,00	1.377.325.379,00	(31.786.006,00)	97,74
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1	BELANJA OPERASI	1.387.911.385,00	1.356.138.579,00	(31.772.806,00)	97,71
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.01	Belanja Pegawai	1.154.181.385,00	1.134.234.732,00	(19.946.653,00)	98,27
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.1.02	Belanja Barang dan Jasa	233.730.000,00	221.903.847,00	(11.826.153,00)	94,94
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2	BELANJA MODAL	21.200.000,00	21.186.800,00	(13.200,00)	99,94
5.7.01.7-01.0-00.0-00.08.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.200.000,00	21.186.800,00	(13.200,00)	99,94
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09	KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH	3.325.928.647,00	3.176.045.536,00	(149.883.111,00)	95,49
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1	BELANJA OPERASI	3.267.523.647,00	3.121.440.536,00	(146.083.111,00)	95,53

5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.01	Belanja Pegawai	2.140.278.647,00	2.115.141.016,00	(25.137.631,00)	98,83
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.127.245.000,00	1.006.299.520,00	(120.945.480,00)	89,27
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.2	BELANJA MODAL	58.405.000,00	54.605.000,00	(3.800.000,00)	93,49
5.7.01.7-01.0-00.0-00.09.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	58.405.000,00	54.605.000,00	(3.800.000,00)	93,49
5.8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	18.173.548.789,00	17.608.251.059,00	(565.297.730,00)	96,89
5.8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18.173.548.789,00	17.608.251.059,00	(565.297.730,00)	96,89
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	18.173.548.789,00	17.608.251.059,00	(565.297.730,00)	96,89
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1	BELANJA OPERASI	18.173.548.789,00	17.608.251.059,00	(565.297.730,00)	96,89
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.01	Belanja Pegawai	1.707.782.789,00	1.660.373.235,00	(47.409.554,00)	97,22
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.923.456.760,00	1.430.568.584,00	(492.888.176,00)	74,37
5.8.01.8-01.0-00.0-00.01.1.05	Belanja Hibah	14.542.309.240,00	14.517.309.240,00	(25.000.000,00)	99,83
6	PEMBIAYAAN DAERAH	-46.580.470.015,00	-52.466.412.260,73	(5.885.942.245,73)	0
6.5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	-46.580.470.015,00	-52.466.412.260,73	(5.885.942.245,73)	0
6.5.02	KEUANGAN	-46.580.470.015,00	-52.466.412.260,73	(5.885.942.245,73)	0
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-46.580.470.015,00	-52.466.412.260,73	(5.885.942.245,73)	0
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.977.221.000,00	-2.908.736.002,73	(6.885.957.002,73)	0
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	-2.908.736.002,73	(2.908.736.002,73)	0
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.977.221.000,00	0,00	(3.977.221.000,00)	0
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.557.691.015,00	49.557.676.258,00	(1.000.014.757,00)	98,02
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	0,00	(1.000.000.000,00)	0
6.5.02.5-02.0-00.0-00.01.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	49.557.691.015,00	49.557.676.258,00	(14.757,00)	100,00

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat

BAB V
REALISASI PENERIMAAN MENURUT JENIS PENERIMAAN DAN REALISASI PENGELUARAN MENURUT JENIS PENGELUARAN DAN
REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS PEMBIAYAAN

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2023

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI			LEBIH / KURANG
			s/d PERIODE LALU	PERIODE INI	TOTAL	
4	PENDAPATAN DAERAH	902.801.135.455,29	0,00	856.716.964.221,29	856.716.964.221,29	(46.084.171.234,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	52.556.329.253,29	0,00	50.255.262.674,29	50.255.262.674,29	(2.301.066.579,00)
4.1.01	Pajak Daerah	26.365.000.000,00	0,00	26.611.248.046,45	26.611.248.046,45	246.248.046,45
4.1.01.06	Pajak Hotel	30.000.000,00	0,00	31.711.638,00	31.711.638,00	1.711.638,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	1.000.000.000,00	0,00	938.318.851,30	938.318.851,30	(61.681.148,70)
4.1.01.08	Pajak Hiburan	6.000.000,00	0,00	6.475.000,00	6.475.000,00	475.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	250.000.000,00	0,00	451.055.086,73	451.055.086,73	201.055.086,73
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	12.650.000.000,00	0,00	13.093.535.668,00	13.093.535.668,00	443.535.668,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	144.000.000,00	0,00	134.200.000,00	134.200.000,00	(9.800.000,00)
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	330.000.000,00	0,00	438.641.004,70	438.641.004,70	108.641.004,70
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	11.325.000.000,00	0,00	11.022.646.092,22	11.022.646.092,22	(302.353.907,78)
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	630.000.000,00	0,00	494.664.705,50	494.664.705,50	(135.335.294,50)
4.1.02	Retribusi Daerah	2.510.467.200,00	0,00	2.307.188.549,00	2.307.188.549,00	(203.278.651,00)
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.251.347.200,00	0,00	1.293.961.650,00	1.293.961.650,00	42.614.450,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	479.120.000,00	0,00	477.040.000,00	477.040.000,00	(2.080.000,00)
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	780.000.000,00	0,00	536.186.899,00	536.186.899,00	(243.813.101,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.555.034.228,35	0,00	2.555.034.228,06	2.555.034.228,06	(0,29)
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	2.555.034.228,35	0,00	2.555.034.228,06	2.555.034.228,06	(0,29)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	21.125.827.824,94	0,00	18.781.791.850,78	18.781.791.850,78	(2.344.035.974,16)
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	262.402.900,00	0,00	262.402.900,00	262.402.900,00	0,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(10.000.000,00)
4.1.04.05	Jasa Giro	1.535.000.000,00	0,00	1.252.978.330,84	1.252.978.330,84	(282.021.669,16)
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.000.000.000,00	0,00	54.850.031,84	54.850.031,84	(945.149.968,16)
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	186.306.280,00	0,00	595.790.776,00	595.790.776,00	409.484.496,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.955.145.272,94	0,00	1.955.145.273,32	1.955.145.273,32	0,38
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	1.435.043.372,00	0,00	1.513.951.476,98	1.513.951.476,98	78.908.104,98
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	14.741.930.000,00	0,00	13.146.673.061,80	13.146.673.061,80	(1.595.256.938,20)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	850.244.806.202,00	0,00	806.461.701.547,00	806.461.701.547,00	(43.783.104.655,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	756.142.277.241,00	0,00	742.992.346.772,00	742.992.346.772,00	(13.149.930.469,00)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	652.525.285.241,00	0,00	639.375.354.772,00	639.375.354.772,00	(13.149.930.469,00)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	17.624.906.000,00	0,00	17.624.906.000,00	17.624.906.000,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	85.992.086.000,00	0,00	85.992.086.000,00	85.992.086.000,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	94.102.528.961,00	0,00	63.469.354.775,00	63.469.354.775,00	(30.633.174.186,00)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	94.102.528.961,00	0,00	63.469.354.775,00	63.469.354.775,00	(30.633.174.186,00)

5	BELANJA DAERAH	853.311.929.437,56	0,00	789.077.180.587,07	789.077.180.587,07	(64.234.748.850,49)
5.1	BELANJA OPERASI	590.732.915.977,56	0,00	553.939.613.670,07	553.939.613.670,07	(36.793.302.307,49)
5.1.01	Belanja Pegawai	341.590.589.217,56	0,00	335.137.897.402,68	335.137.897.402,68	(6.452.691.814,88)
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	222.494.972.649,00	0,00	219.131.685.685,68	219.131.685.685,68	(3.363.286.963,32)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	44.904.309.682,56	0,00	43.205.463.811,00	43.205.463.811,00	(1.698.845.871,56)
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	60.149.692.110,00	0,00	58.924.947.508,00	58.924.947.508,00	(1.224.744.602,00)
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	12.797.734.776,00	0,00	12.710.470.398,00	12.710.470.398,00	(87.264.378,00)
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	180.000.000,00	0,00	120.000.000,00	120.000.000,00	(60.000.000,00)
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	510.880.000,00	0,00	510.880.000,00	510.880.000,00	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	553.000.000,00	0,00	534.450.000,00	534.450.000,00	(18.550.000,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	211.069.017.782,00	0,00	181.068.431.375,39	181.068.431.375,39	(30.000.586.406,61)
5.1.02.01	Belanja Barang	45.609.252.656,00	0,00	37.932.866.071,00	37.932.866.071,00	(7.676.386.585,00)
5.1.02.02	Belanja Jasa	83.455.785.534,00	0,00	72.406.474.366,00	72.406.474.366,00	(11.049.311.168,00)
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	4.835.965.900,00	0,00	4.311.266.687,00	4.311.266.687,00	(524.699.213,00)
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	27.398.502.140,00	0,00	22.205.096.124,00	22.205.096.124,00	(5.193.406.016,00)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.625.250.000,00	0,00	772.669.600,00	772.669.600,00	(852.580.400,00)
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	35.455.952.000,00	0,00	30.233.509.641,00	30.233.509.641,00	(5.222.442.359,00)
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	12.688.309.552,00	0,00	13.206.548.886,39	13.206.548.886,39	518.239.334,39
5.1.03	Belanja Bunga	5.604.678.733,00	0,00	5.604.656.807,00	5.604.656.807,00	(21.926,00)
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	5.604.678.733,00	0,00	5.604.656.807,00	5.604.656.807,00	(21.926,00)
5.1.05	Belanja Hibah	30.433.630.245,00	0,00	30.097.628.085,00	30.097.628.085,00	(336.002.160,00)
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	21.541.190.360,00	0,00	21.241.718.200,00	21.241.718.200,00	(299.472.160,00)
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	8.510.130.645,00	0,00	8.473.600.645,00	8.473.600.645,00	(36.530.000,00)
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	382.309.240,00	0,00	382.309.240,00	382.309.240,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.035.000.000,00	0,00	2.031.000.000,00	2.031.000.000,00	(4.000.000,00)
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	35.000.000,00	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	(4.000.000,00)
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	122.113.324.403,00	0,00	104.470.041.194,00	104.470.041.194,00	(17.643.283.209,00)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	777.205.000,00	0,00	114.678.920,00	114.678.920,00	(662.526.080,00)
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	777.205.000,00	0,00	114.678.920,00	114.678.920,00	(662.526.080,00)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19.286.313.000,00	0,00	14.492.973.744,00	14.492.973.744,00	(4.793.339.256,00)
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	69.560.000,00	0,00	68.900.000,00	68.900.000,00	(660.000,00)
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	2.130.000.000,00	0,00	866.850.000,00	866.850.000,00	(1.263.150.000,00)
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	13.700.000,00	0,00	9.973.000,00	9.973.000,00	(3.727.000,00)
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	156.830.000,00	0,00	100.405.000,00	100.405.000,00	(56.425.000,00)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.775.805.000,00	0,00	3.154.156.671,00	3.154.156.671,00	(621.648.329,00)
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	554.600.000,00	0,00	456.580.000,00	456.580.000,00	(98.020.000,00)
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	4.267.321.400,00	0,00	4.007.414.176,00	4.007.414.176,00	(259.907.224,00)
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	495.850.000,00	0,00	475.310.000,00	475.310.000,00	(20.540.000,00)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.373.486.600,00	0,00	2.795.504.058,00	2.795.504.058,00	(577.982.542,00)

5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	14.880.000,00	0,00	14.880.000,00	14.880.000,00	0,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	4.434.280.000,00	0,00	2.543.000.839,00	2.543.000.839,00	(1.891.279.161,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	22.141.195.122,00	0,00	21.670.949.610,00	21.670.949.610,00	(470.245.512,00)
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	22.141.195.122,00	0,00	21.670.949.610,00	21.670.949.610,00	(470.245.512,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.926.552.281,00	0,00	64.937.158.088,00	64.937.158.088,00	(12.989.394.193,00)
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	76.815.405.778,00	0,00	63.893.200.293,00	63.893.200.293,00	(12.922.205.485,00)
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.111.146.503,00	0,00	1.043.957.795,00	1.043.957.795,00	(67.188.708,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.982.059.000,00	0,00	3.254.280.832,00	3.254.280.832,00	1.272.221.832,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.982.059.000,00	0,00	3.254.280.832,00	3.254.280.832,00	1.272.221.832,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.000.000.000,00	0,00	106.353.000,00	106.353.000,00	(893.647.000,00)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	106.353.000,00	106.353.000,00	(893.647.000,00)
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	106.353.000,00	106.353.000,00	(893.647.000,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	139.465.689.057,00	0,00	130.561.172.723,00	130.561.172.723,00	(8.904.516.334,00)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.446.117.473,00	0,00	0,00	0,00	(4.446.117.473,00)
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.854.509.348,00	0,00	0,00	0,00	(3.854.509.348,00)
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	591.608.125,00	0,00	0,00	0,00	(591.608.125,00)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	135.019.571.584,00	0,00	130.561.172.723,00	130.561.172.723,00	(4.458.398.861,00)
5.4.02.04	Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	505.392.888,00	0,00	505.392.888,00	505.392.888,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	134.514.178.696,00	0,00	130.055.779.835,00	130.055.779.835,00	(4.458.398.861,00)
	SURPLUS / DEFISIT	49.489.206.017,73	0,00	67.639.783.634,22	67.639.783.634,22	18.150.577.616,49
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	3.977.221.000,00	0,00	-2.908.736.002,73	-2.908.736.002,73	(6.885.957.002,73)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	-2.908.736.002,73	-2.908.736.002,73	(2.908.736.002,73)
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	-2.908.736.002,73	-2.908.736.002,73	(2.908.736.002,73)
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.977.221.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.977.221.000,00)
6.1.05.06	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	3.977.221.000,00	0,00	0,00	0,00	(3.977.221.000,00)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.557.691.015,00	0,00	49.557.676.258,00	49.557.676.258,00	(1.000.014.757,00)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000.000,00)
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000.000.000,00)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	49.557.691.015,00	0,00	49.557.676.258,00	49.557.676.258,00	(14.757,00)
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	49.557.691.015,00	0,00	49.557.676.258,00	49.557.676.258,00	(14.757,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	(46.580.470.015,00)	0,00	(52.466.412.260,73)	(52.466.412.260,73)	(5.885.942.245,73)
	SISA LEBIH / KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	2.908.736.002,73	0,00	15.173.371.373,49	15.173.371.373,49	12.264.635.370,76

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat

BAB VI INOVASI DAERAH

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menegaskan bahwa Kepala Daerah melaporkan Inovasi Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian Inovasi Daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah.

Pada saat pemberian penghargaan dan/atau insentif inovasi daerah, kepala daerah akan dilakukan validasi dan presentasi kepala daerah. Presentasi tersebut disampaikan dihadapan tim penilai. Kementerian Dalam Negeri menetapkan daerah Provinsi, daerah Kabupaten/Kota sebagai calon penerima penghargaan Inovasi Daerah berupa Innovative Government Award (IGA) berdasarkan hasil penilaian daerah dengan skema:



Sumber data : BAPERIDDA

Keterangan Diagram : Kabupaten Tulang Barat dari tahun 2021 sampai 2023 cenderung meningkat, dari angka 35.93 di tahun 2021 menjadi 39,25 di tahun 2023 Klasifikasi **Inovatif**.

Beberapa Inovasi yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut :

NO	NAMA INOVASI	SUMBER OPD
1	Batas Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh
2	CITYBER (Cinta Tiyuh Bersih)	Dinas Lingkungan Hidup
3	Elektronik Kartu Petani Berjaya (E-KPB)	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan
4	ELEKTRONIK SERVICE MOBILE (E-SMILE)-PEMBAHARUAN	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tulang Bawang Barat
5	Festival Tiyuh-Tiyuh	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

NO	NAMA INOVASI	SUMBER OPD
6	Forum Anak Menuju Tubaba Kabupaten Layak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	GASPOL (Gerakan Cegah Stunting Melalui Perbaikan Pola Asuh)	Dinas Kesehatan
8	GAWEI TIKEU	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
9	GERAKAN CERIA (Cegah Remaja Pada Anemia)	Dinas Kesehatan
10	Harmonisasi Hubungan Industrial Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
11	BANK SAMPAH	Dinas Lingkungan Hidup
12	E-MEDIA	Dinas Komunikasi dan Informatika
13	JDIH Sekretariat DPRD TUBABA	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
14	SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat) Tubaba	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15	Tiyuh Calak	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh
16	KAJI TINDAK TEKNOLOGI BATANG TERNAK BERBASIS BATANG SINGKONG (RABAKONG)	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
17	KLINIK INOVASI DAERAH	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
18	MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP)	Dinas PM & PTSP
19	MANTRA (MAJU DAN SEJAHTERA)	Dinas Sosial
20	Modul Pendidikan Karakter Nenemo SSL	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21	Nenemo Mandiri Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
22	Operasi Yustisi Penegakan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Covid-19	Satuan Polisi Pamong Praja
23	PAMPERS (PENERBITAN AKTA ANAK PASCA PERSALINAN)	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
24	PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM	Bagian Hukum
25	PODCAST TUBABAQU	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	NAMA INOVASI	SUMBER OPD
26	PROGRAM TENAGA GURU PENGGERAK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
27	Program Tulang Bawang Barat Cerdas	Program Tulang Bawang Barat Cerdas
28	Signature (Sertifikat Elektronik)	Dinas PM & PTSP
29	SIMPEL TARI (Sistem Pelayanan Tanpa Ribet)	Dinas PM & PTSP
30	Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik	Dinas PM & PTSP
31	STAND IKM Rest Area KM 215 Way Kenanga	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
32	Teknologi Tepat Guna	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh
33	TUBABA ART FESTIVAL	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata

Sumber data : BAPERIDDA



KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024